



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI RIAU



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

Laporan Kinerja

Pengadilan Tinggi Riau :::::

Tahun 2024



Email
admin@pt-riau.go.id



Website
pt-riau.go.id



PENGADILAN TINGGI RIAU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI RIAU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Riau untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, 24 Februari 2025

Pereviu I

(T. Yudianto Syafei Narim, S.IP, S.H., M.M.)

Pereviu II

(Roby Hidayat, S.T., M.M.)

Kata Pengantar

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 2049/SEK/SK/XII/2022, maka Pengadilan Tinggi Riau perlu menyusun Laporan Kinerja untuk disampaikan kepada Mahkamah Agung RI dan masyarakat pengguna layanan pengadilan..

Laporan kinerja ini merupakan bentuk atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, penggunaan anggaran, dan pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024 dan sebagai tahun terakhir dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Harapan kami semoga laporan kinerja ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Riau selama tahun 2024, dan melalui laporan ini diharapkan adanya optimalisasi peran Pengadilan Tinggi Riau dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Pengadilan Tinggi Riau pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Mahkamah Agung dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* untuk mencapai visi Mahkamah Agung yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.



Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Asri Ginting



Email
admin@pt-riau.go.id



Website
pt-riau.go.id

Ringkasan Eksekutif

.....

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

101,4%



SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	97,0%	100,0%	103,1%
2. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	97,0%	100,0%	103,1%
3. Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	100,0%	100,0%	100,0%
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	40,0%	41,8%	104,5%
5. Index Persepsi <i>Stakeholder</i> yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97,0%	99,9%	103,0%
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1			102,7%

SASARAN STRATEGIS 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100,0%	100,0%	100,0%
2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100,0%	100,0%	100,0%
3. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100,0%	100,0%	100,0%
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2			100,0%



Email
admin@pt-riau.go.id



Website
pt-riau.go.id

Secara umum, pada tahun 2024 realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Riau telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dari 8 (delapan) indikator kinerja utama pada 2 (dua) Sasaran Strategis, seluruh indikator dinyatakan telah mencapai target, bahkan beberapa indikator melebihi target.

Sasaran Strategis 1 “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” telah memenuhi capaian $\geq 100\%$ yaitu sebesar 102,7%, sedangkan Sasaran Strategis 2 “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” telah mempertahankan capaian yang selalu diperoleh setiap tahun yaitu sebesar 100%.

Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Riau tahun 2024 jika dibandingkan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1 Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	96,0%	100,0%	104,2%	97,0%	100,0%	103,1%
		2 Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	96,0%	100,0%	104,2%	97,0%	100,0%	103,1%
		3 Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		4 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40,0%	42,5%	106,3%	40,0%	41,8%	104,5%
		5 Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	96,0%	98,2%	102,2%	97,0%	99,9%	103,0%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1		103,4%		102,7%		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		2 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		3 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2		100,0%		100,0%		
Rata - Rata Capaian KinerjaSasaran Strategis 1 dan 2			101,7%			101,4%		

Berdasarkan tabel capaian kinerja tahun 2023 dan tahun 2024, pada tahun 2024 rata-rata capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau dibandingkan tahun 2023 menurun 0,3%. Pada tahun 2024 capaian kinerja sebesar 101,4% sedangkan tahun 2023 sebesar 101,7%. Kondisi ini disebabkan karena terdapat beberapa indikator kinerja yang targetnya tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, namun realisasi tetap sama sebesar 100%.



Selain itu penurunan tersebut juga disebabkan karena realisasi salah satu indikator kinerja yaitu “Persentase perkara yang tidak mengajukan kasasi”, pada tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun 2023, namun capaian kinerja indikator tersebut tetap melebihi target.

Untuk mencapai kinerja sesuai target yang telah ditetapkan, Pengadilan Tinggi Riau didukung dengan anggaran yang penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel, dan efisien, karena adanya kesesuaian antara realisasi belanja dengan capaian kinerja. Selain anggaran, penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) juga dikelola dengan efektif, sehingga Pengadilan Tinggi Riau mampu mencapai kinerja yang maksimal walaupun jumlah SDM belum memenuhi standar jumlah maksimal.

Tabel 2. Analisis Efisiensi Anggaran dan Sumber Daya Manusia

Uraian		Capaian Kinerja			Belanja				Sumber Daya Manusia (SDM)		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Standar Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Tahun 2024	Perbandingan (%)
1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1 Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,1%	DIPA (01) BUA	26.848.880.000	26.842.869.097	99,98%	131	94	72%
	2 Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,1%							
	3 Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100,0%							
	4 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	41,8%	104,5%							
	5 Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97%	99,9%	103,0%							
Rata - Rata Capaian Kinerja				102,7%	Realisasi Anggaran			99,98%	Ketersediaan SDM		72%
Kesimpulan : EFISIEN karena Capaian kinerja > Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja > Ketersediaan SDM											
2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	Biaya Proses	32.400.000	32.300.000	99,69%	131	94	72%
	2 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	DIPA (03) Badilum	235.514.000	235.483.834	99,99%			
	3 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%							
Rata - Rata Capaian Kinerja				100,0%	Realisasi Anggaran			99,95%	Ketersediaan SDM		72%
Kesimpulan : EFISIEN karena Capaian kinerja > Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja > Ketersediaan SDM											

Secara umum kinerja Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2024 dinyatakan berhasil. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya prestasi dan penghargaan yang diraih Pengadilan Tinggi Riau dan satuan unit kerja dibawahnya.

Prestasi dan Penghargaan Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024

1. **Penghargaan Peringkat I Penilaian Layanan Pengadilan/ PTSP Tahun 2024**, dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, diserahkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum pada tanggal 5 Desember 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru.



2. **Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Siswandriyono, S.H., M.Hum.** menerima penghargaan sebagai **Role Model Pengadilan Tinggi**, dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, yang diserahkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 5 Desember 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru.



3. **Penghargaan Peringkat Terbaik II atas pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2023**, dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, diserahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 5 Desember 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru.



4. **Sertifikat AMPUH berpredikat Unggul untuk Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Banding**, dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, diserahkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 5 Desember 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru.



5. **Penghargaan Peringkat I Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2024**, dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, diserahkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 5 Desember 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru.



6. **Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau, Sukri Sulumin, S.H., M.H.**, menerima penghargaan apresiasi atas kontribusi dan dedikasi terbaik dalam pelaksanaan pengawasan daerah pada wilayah hukumnya, diserahkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 5 Desember 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru.



7. **Penghargaan Peringkat I Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Kategori Pagu 10 s.d 50 Miliar Periode Tahun Anggaran 2024**, dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru, pada tanggal 27 Agustus 2024.



8. **Penghargaan Peringkat I Satuan Kerja dengan Pengguna Digipay Terbaik Semester 1 Tahun 2024**, dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru, pada tanggal 27 Agustus 2024.



9. **Penghargaan Petugas Satuan Kerja Terbaik atas nama EKA CHITRA MUVIRANTI Semester 1 Tahun 2024**, dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru, pada tanggal 27 Agustus 2024.



10. **Penerima Layanan Prioritas Khusus Satuan Kerja Terbaik yang berlaku s.d 31 Oktober 2024**, dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru. Pengadilan Tinggi Riau, pada tanggal 27 Agustus 2024.



11. **Prestasi Terbaik Membina Satuan Kerja Dibawahnya Dalam Pengelolaan DIPA 03 Tahun 2023 dengan Nilai Rata-rata 96.64%**, dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, pada tanggal 15 Juli 2024.



12. **Penghargaan Terbaik Pertama Kualitas Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W dengan Jumlah Satuan Kerja UAKPA 11 s.d 20**, dari Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Negara Provinsi Riau pada tanggal 11 Juni 2024.



13. **Penghargaan Satuan Kerja Peringkat I Perintis Pengguna Digipay Satu Terbanyak Triwulan I Tahun 2024**, dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru, pada tanggal 08 Mei 2024.



14. **Apresiasi sebagai Satuan Kerja Pengguna Digipay Satu Triwulan I Tahun 2024**, dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru, tanggal 08 Mei 2024.



Prestasi dan Penghargaan Satuan Kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024



1. **Penilaian Evaluasi Implementasi SIPP (EIS).** Pengadilan Negeri Pekanbaru menerima penghargaan Terbaik II sebagai Satuan Kerja Dengan Capaian Nilai Tertinggi Pada Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Tahun 2024 Kategori Pengadilan Negeri Kelas IA Dengan Perkara > 2000 dari Dirjen Badilum.



2. **Penilaian Role Model Ketua Pengadilan Negeri** Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Bapak Raden Heru Kuntodewo, S.H., M.H. pada tanggal 5 Desember 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru menerima penghargaan Role Model Ketua Pengadilan Negeri Terbaik Pada Pengadilan Negeri Kelas IB Dan Kelas II Dari Dirjen Badilum.



3. **Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP)** Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Desember 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru menerima penghargaan sebagai Terbaik Ke V Penilaian Lomba Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 Pada Pengadilan Negeri Kelas IA dari Dirjen Badilum.



4. **Penilaian Belanja dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Tahun 2024.** Pengadilan Negeri Rengat (098860) menerima penghargaan sebagai Peringkat III Belanja Dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat.



Email
admin@pt-riau.go.id



Website
pt-riau.go.id

X



5. Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 27 Agustus 2024 menerima penghargaan sebagai Satuan Kerja Dengan Capaian IKPA Berpredikat Sangat Baik Semester I Tahun 2024 dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat.



6. Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 27 Agustus 2024 menerima penghargaan sebagai Satuan Kerja Dengan Capaian IKPA Berpredikat Sempurna Semester I Tahun 2024 dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat.



7. Penilaian Evaluasi Implementasi SIPP (EIS)

Pengadilan Negeri Rengat menerima penghargaan Terbaik VII sebagai Satuan Kerja Dengan Capaian Nilai Tertinggi Pada Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Tahun 2024 Kategori Pengadilan Negeri Kelas II Dengan Perkara 501 s/d 1.000 dari Dirjen Badilum



8. Penilaian Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh

Pengadilan Negeri Bangkinang menerima penghargaan Sertifikat AMPUH Berpredikat Unggul untuk Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB Tahun 2024 dari Dirjen Badilum.





9. **Penilaian Layanan Pengadilan /Ptsp Tahun 2024**
Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 5 Desember 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru menerima penghargaan sebagai Peringkat Terbaik I Penilaian Pelayanan Pengadilan (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Kelas IB Dan Kelas II Tahun 2024 dari Dirjen Badilum



10. **Penilaian Role Model Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas IB**
Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang Immanuel Rismawati, S.E., Ak., M.Si. pada tanggal 5 Desember 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru menerima penghargaan Role Model Sekretaris Terbaik Pada Pengadilan Negeri Kelas IB dari Dirjen Badilum.



11. **Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)**
Pengadilan Negeri Bangkinang (400141) pada tanggal 27 Agustus 2024 menerima penghargaan sebagai Peringkat V dengan Nilai IKPA Terbaik Kategori Pagu Di Bawah 10 Miliar Semester I TA 2024 dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru.



12. **PENILAIAN PETUGAS SATUAN KERJA TERBAIK**
Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 27 Agustus 2024 menerima penghargaan sebagai Petugas Satuan Kerja Terbaik atas nama Alichia Diah Octiningtyas Semester 1 Tahun 2024 dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru





13. Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2024

Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 5 Desember 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru menerima penghargaan sebagai Terbaik Ke II Penilaian Lomba Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 Pada Pengadilan Negeri Kelas IB Dan Kelas II dari Dirjen Badilum.



14. Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura (477343) pada tanggal 27 Agustus 2024 menerima penghargaan sebagai Peringkat IV dengan Nilai IKPA Terbaik Kategori Pagu Di Bawah 10 Miliar Semester I TA 2024 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru.



15. Penilaian Administrasi dan Keuangan Perkara

Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 5 Desember 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru menerima penghargaan sebagai Terbaik I Penilaian Administrasi dan Keuangan Perkara Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Kelas IB dan Kelas II dari Dirjen Badilum



16. Penilaian Role Model Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas II

Sekretaris Pengadilan Negeri Tembilahan Andry Kusuma Putra, S.E. pada tanggal 5 Desember 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru menerima penghargaan Role Model Sekretaris Terbaik Pada Pengadilan Negeri Kelas II dari Dirjen Badilum.





17. Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Pengadilan Negeri Tembilahan (098874) pada tanggal 27 Agustus 2024 menerima penghargaan Dengan Nilai IKPA Sempurna kategori Pagu di Bawah 5 Miliar Semester I TA 2024 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengas.



18. Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Pengadilan Negeri Tembilahan (099217) pada tanggal 27 Agustus 2024 menerima penghargaan Dengan predikat IKPA Sangat Baik Semester I TA 2024 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengas.



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2024.....	v
PRESTASI DAN PENGHARGAAN SATKER DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2024	v
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GRAFIK	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix

BAB I

PENDAHULUAN

<i>Latar Belakang</i>	2
<i>Tugas Pokok dan Fungsi</i>	3
<i>Struktur Organisasi</i>	4
<i>Isu Strategis</i>	5
<i>Sistematika Penyajian</i>	8

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

<i>Rencana Strategis 2020-2024</i>	10
<i>Rencana Kinerja Tahun 2024</i>	15
<i>Perjanjian Kinerja Tahun 2024</i>	16

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

<i>Capaian Kinerja Organisasi</i>	18
• <i>Capaian Kinerja Tahun 2024</i>	18
• <i>Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja</i>	19
• <i>Realisasi Kinerja dibandingkan Tahun Sebelumnya</i>	45
• <i>Realisasi Kinerja dibandingkan Target Jangka Menengah</i>	47
• <i>Realisasi Kinerja dibandingkan Level Nasional</i>	48
• <i>Analisis Efisiensi Sumber Daya</i>	52
<i>Realisasi Anggaran</i>	56

BAB IV

PENUTUP

<i>Kesimpulan</i>	61
<i>Rekomendasi</i>	62

LAMPIRAN



Daftar Tabel

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024	5
Tabel 2. Analisis Efisiensi Anggaran dan Sumber Daya Manusia	6
Tabel 3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Riau	3
Tabel 4. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	14
Tabel 5. Rencana Kinerja Tahun 2024	15
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	16
Tabel 7. Capaian Kinerja Tahun 2024.....	18
Tabel 8. Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu.....	20
Tabel 9. Capaian Indikator Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 s.d 2024	21
Tabel 10. Capaian Indikator Persentase Perkara Perdata Tepat Waktu Th. 202 s.d 2024.....	21
Tabel 11. Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu bulan Januari s.d Desember 2024	23
Tabel 12. Capaian Indikator Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 s.d 2024	23
Tabel 13. Capaian Indikator Persentase Perkara Pidana Tepat Waktu Tahun 2020 s.d 2024	24
Tabel 14. Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu bulan Januari s.d Desember 2024	25
Tabel 15. Capaian Indikator Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu.....	26
Tabel 16. Capaian indikator Persentase Perkara Pidana Khusus Tepat Waktu Th. 2020 s.d 2024.....	26
Tabel 17. Capaian Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Th. 2020 s.d 2024	29
Tabel 18. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada bulan Januari s.d Desember 2024.....	30
Tabel 19. Capaian Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Th. 2020 s.d 2024 dibandingkan Target Jangka Menengah.....	30
Tabel 20. Capaian Kinerja Index Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap Layanan Peradilan.....	33
Tabel 21. Capaian Indikator Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	34
Tabel 22. Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim	37
Tabel 23. Capaian indikator “Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang	38



Tabel 24. Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju pada tahun 2024.....	40
Tabel 25. Capaian indikator “Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana	40
Tabel 26. Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Tipikor yang dikirim ke Pengadilan Pengaju pada tahun 2024.....	42
Tabel 27. Capaian indikator “Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim.....	43
Tabel 28. Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	45
Tabel 29. Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan Target Jangka Menengah.....	47
Tabel 30. Capaian kerja Pengadilan Tinggi Riau dibandingkan dengan rata-rata capaian nasional.....	48
Tabel 31. Capaian Kinerja Nasional 34 Pengadilan Tinggi di lingkungan Badan Peradilan Umum.....	50
Tabel 32. Capaian Kinerja Nasional 15 Pengadilan Tinggi di lingkungan Badan Peradilan Umum Kategori Pengadilan Jumlah Perkara 301 s.d 1.000 Perkara.....	51
Tabel 33. Analisis Efisiensi Anggaran	52
Tabel 34. Formasi Pegawai Pengadilan Tingkat Banding.....	54
Tabel 35. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia	55
Tabel 36. Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2024.....	56
Tabel 37. Rincian Belanja Pegawai dan Belanja Barang Tahun 2024	57
Tabel 38. Realisasi DIPA 01 Tahun 2020 s.d 2024.....	57
Tabel 39. Realisasi Anggaran DIPA (03) Tahun 2024.....	58
Tabel 40. Realisasi DIPA (03) Tahun 2020 s.d 2024.....	58
Tabel 41. Penerimaan dan Realisasi Biaya Proses Perdata Tahun 2024 .	59



Daftar Grafik

Grafik 1. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	21
Grafik 2. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	23
Grafik 3. Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 s.d 2024	26
Grafik 4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	29
Grafik 5. Realisasi Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020 s.d 2024	32
Grafik 6. Capaian indikator “Persentase P Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu” Tahun 2020 s.d 2024 .	38
Grafik 7. Capaian indikator “Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Tepat Waktu” Tahun 2020 s.d 2024	41
Grafik 8. Capaian indikator “Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Tepat Waktu” Tahun 2020 s.d 2024 ...	43
Grafik 9. Capaian Kinerja Tahun 2020 s.d Tahun 2024	46
Grafik 10. Realisasi DIPA 01 Tahun 2020 s.d 2024	57
Grafik 11. Realisasi DIPA (03) Tahun 2020 s.d 2024	58
Grafik 12. Realisasi DIPA (03) Tahun 2020 s.d 2024	58



Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Riau	4
Gambar 2. Visi, Misi, dan Tujuan Pengadilan Tinggi Riau	10
Gambar 3. Framework Rencana Strategis.....	13
Gambar 5. Pengukuran capaian indikator “Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu”	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6. Pengukuran capaian indikator “Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu”	22
Gambar 7. Pengukuran capaian indikator “Persentase Perkara Pidana Khusus.....	25
Gambar 8. Pengukuran capaian indikator “Persentase Perkara yang	28
Gambar 9. Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024.....	32
Gambar 10. Pengukuran capaian indikator “Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata	37
Gambar 11. Pengukuran capaian indikator kinerja “ Persentase Salinan Putusan perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu” pada Evakip	39
Gambar 12. Pengukuran capaian indikator kinerja “ Persentase Salinan Putusan perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu” pada Evakip	42



Bab I

Pendahuluan

- Latar Belakang
- Struktur Organisasi
- Tugas Pokok dan Fungsi
- Isu Strategis
- Sistematika Penyajian



Email
admin@pt-riau.go.id



Website
pt-riau.go.id

Latar Belakang

Pengadilan Tinggi Riau berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1982 dan diresmikan pada tanggal 21 Juli 1983. Awalnya wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau meliputi 15 (lima belas) Pengadilan Negeri di wilayah provinsi Riau dan provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan setelah diresmikannya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada tanggal 5 Desember 2022, maka 4 (empat) Pengadilan Negeri di Kepulauan Riau menjadi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau menjadi 11 (sebelas) Pengadilan Negeri di Provinsi Riau, yaitu:

1. Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA
2. Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA
3. Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB
4. Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB
5. Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB
6. Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas IB
7. Pengadilan Negeri Rengat Kelas II
8. Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II
9. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II
10. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II
11. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kelas II



Sebagai bagian dari peradilan umum, Pengadilan Tinggi Riau secara hirarki organisatoris dan administratif berada di bawah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat banding.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Tinggi dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Tinggi Riau atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2024 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pengadilan Tinggi Riau. Laporan Kinerja ini dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholder* demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Riau diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Tabel 3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Riau

TUGAS POKOK	FUNGSI
 Mengadili perkara pidana, perdata, dan tindak pidana korupsi di Tingkat banding	 Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding.
 Mengadili di Tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.	 Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan Pembangunan
 Menerima, memeriksa, dan menyelesaikan setiap perkara di Tingkat	 Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat Struktural, dan Pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya Peradilan Tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum.
	 Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
	 Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, Keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan administrasi peradilan.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan uraian tugas Pengadilan Tinggi Riau mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Riau



URAIAN TUGAS

KETUA mempunyai tugas sebagai pimpinan Pengadilan, bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dibantu oleh Wakil, menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

WAKIL KETUA bertugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

HAKIM bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya.

PANITERA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

SEKRETARIS mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

PANMUD PIDANA bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana serta pengelolaan teknologi informasi.	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
PANMUD PERDATA bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata.		
PANMUD TIPIKOR bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana khusus dan barang bukti	SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN & IT bertugas membantu Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA bertugas membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
PANMUD HUKUM bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran Notaris, Penasehat Hukum dan badan hukum, administrasi kewarganegaraan, Balai Harta peninggalan dan administrasi yang berkaitan dengan catatan sipil dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN bertugas membantu Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian dalam melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantuan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN bertugas membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
PANITERA PENGGANTI mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan.		

Isu Strategis

Pengadilan Tinggi Riau sebagai pengadilan tingkat banding yang membawahi 11 (sebelas) Pengadilan Negeri di wilayah hukum provinsi Riau memiliki peran yang sangat penting, mengingat Pengadilan Tinggi Riau secara lokasi maupun hirarki adalah institusi terdekat dengan pengadilan-pengadilan tingkat pertama di wilayah provinsi Riau.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, peran strategis Pengadilan Tinggi Riau sebagai pengadilan tingkat banding adalah dalam hal mengadili perkara tingkat banding di wilayah hukumnya, mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya, memberi keterangan pertimbangan dan nasihat hukum pada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta, hingga peran melakukan pengawasan jalannya peradilan di pengadilan tingkat pertama dan menjaga peradilan di wilayah hukumnya dilaksanakan dengan seksama dan sewajarnya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, selama kurun waktu 2024, Pengadilan Tinggi Riau telah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam menghadapi beberapa isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan Manajemen Administrasi Perkara

Dalam rangka meningkatkan manajemen administrasi perkara, Direktorat Jenderal badan peradilan Umum membangun aplikasi EIS (Evaluasi Implementasi SIPP) adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk memantau kinerja peradilan umum di Indonesia. EIS merupakan bagian dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Komponen yang dinilai pada EIS meliputi kinerja, kepatuhan, kelengkapan, dan kesesuaian dalam implementasi administrasi perkara di SIPP. Berdasarkan hasil penilaian EIS Badilum, Pengadilan Tinggi Riau belum memperoleh penilaian terbaik dalam implementasi SIPP. Sehingga pada tahun 2024, Pengadilan Tinggi Riau berupaya meningkatkan kinerja administrasi perkara dan membentuk Tim Pengawasan SIPP yang melaksanakan tugas untuk :

- Memantau pelaksanaan SIPP dalam hal kinerja, kepatuhan, kelengkapan, dan kesesuaian
- Memantau pelaksanaan SIPP dalam hal keakuratan dan kualitas data
- Menjamin pelaksanaan implementasi SIPP

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Peradilan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung Republik Indonesia memberlakukan program AMPUH (Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh) melalui Surat Keputusan Dirjen Badilum No. 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024. Tujuan Program AMPUH adalah meningkatkan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, manajemen pelayanan, mengevaluasi kualitas dan standar pelayanan di setiap pengadilan, mendukung pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat. Pada tahun 2024 Pengadilan Tinggi Riau mengikuti program Ampuh dan setelah dilakukan asesmen oleh Badilum dinyatakan memperoleh predikat “Unggul” dalam pelaksanaan program Ampuh. Peningkatan akuntabilitas kinerja

3. Peningkatan Sarana Pelayanan Publik

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan pengadilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Pada tahun 2024 Pengadilan Tinggi Riau memperluas ruang PTSP dan membangun inovasi ruang Pelayanan Publik dan PTSP terpantau. Inovasi ini bertujuan mencegah pelanggaran dan penyimpangan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan secara aman, nyaman, dan indah.

4. Pembangunan Zona Integritas

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang bermuara

kepada usaha meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan dukungan aparat yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi di dalam proses birokrasi yang efektif dan efisien. Pada tahun 2023, pembangunan zona Integritas Pengadilan Tinggi Riau telah memperoleh predikat WBK dan tahun 2024 Pengadilan Tinggi Riau harus mempertahankan predikat WBK dan menuju WBBM. Beberapa strategi untuk mempertahankan WBK dan menuju WBBM antara lain meningkatkan komitmen pimpinan dan jajarannya, meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan, melakukan moitoring dan evaluasi, membimbing satker Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengusulkan zona integritas predikat WBK, dan mengembangkan inovasi yang direplikasi oleh satuan kerja lain.

5. Peningkatan Sarana Pelayanan Publik

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan pengadilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Pada tahun 2024 Pengadilan Tinggi Riau memperluas ruang PTSP dan membangun inovasi ruang Pelayanan Publik dan PTSP terpantau. Inovasi ini bertujuan mencegah pelanggaran dan penyimpangan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan secara aman, nyaman, dan indah.

6. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Implementasi akuntabilitas kinerja adalah upaya instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan keberhasilannya dalam mencapai tujuan organisasi yang dilakukan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka meningkatkan implementasi akuntabilitas kinerja, Pengadilan Tinggi Riau membangun inovasi SATRIA (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Riau), yang mengakomodir implementasi SAKIP Pengadilan Tinggi Riau dan satuan kerja di bawahnya, meliputi tahap Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi. Inovasi ini selain bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja, juga untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian kinerja satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau.

7. Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan.

Kualitas pembinaan dan pengawasan menjadi isu strategis karena tujuan pembinaan dan pengawasan internal yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Riau, baik pengawasan bidang maupun pengawasan daerah tidak hanya dilihat dari banyaknya temuan yang diperoleh/dilaporkan, namun juga terlihat dari efektifitas tindak lanjut yang dilaksanakan atas temuan tersebut. Tanpa adanya tindak lanjut maka tujuan pengawasan tidak tercapai yakni peningkatan kinerja bagi organisasi dan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Sistematika Penyajian

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategisc issued) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



Bab II

Perencanaan

- Rencana Strategis Tahun 2020-2024
- Rencana Kinerja Tahun 2024
- Perjanjian Kinerja Tahun 2024



Email
admin@pt-riau.go.id



Website
pt-riau.go.id

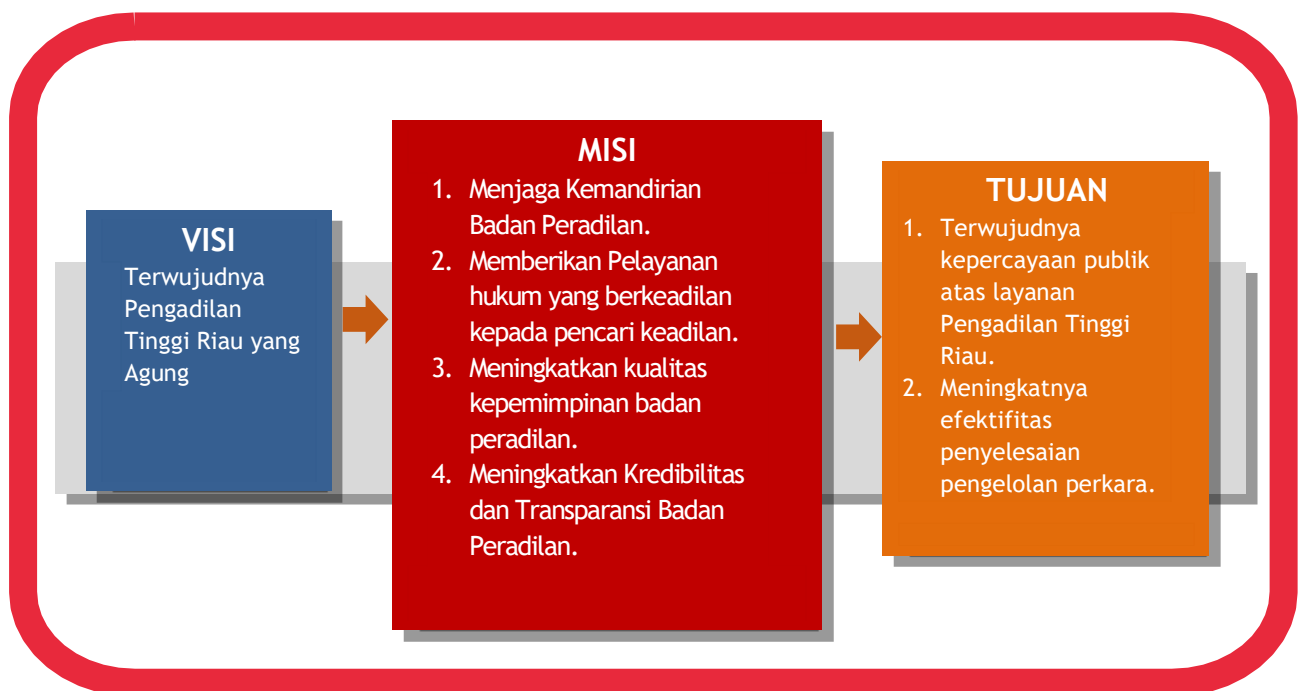
Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka 5 tahun mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Riau melalui perencanaan yang efektif, terarah, dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) penyusunan laporan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Pengadilan Tinggi Riau menyusun Rencana Strategis 2020-2024 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

IKU mengacu pada indikator kinerja utama Mahkamah Agung yang telah direviu berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Gambar 2. Visi, Misi, dan Tujuan Pengadilan Tinggi Riau



VISI

Visi Pengadilan Tinggi Riau yaitu : **“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Riau yang Agung”**

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Tinggi Riau untuk menjadikan Pengadilan Tinggi Riau sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, telah dirumuskan Misi Pengadilan Tinggi Riau, sesuai misi Mahkamah Agung adalah:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan

TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Riau, sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Riau.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan ini adalah :

- a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
- b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.
- c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
- e. Indeks persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan

2. Meningkatnya efektifitas penyelesaian pengelolaan perkara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan ini adalah :

- a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
- b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.
- c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.

SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Tinggi Riau menggunakan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
- b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
- c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
- e. Index persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
- b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
- c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Riau menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

- a. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Indikator kegiatan ini adalah Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional.

- b. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

Indikator kegiatan ini adalah Pengadaan sarana dan prasarana.

Program Dukungan Manajemen mendukung capaian indikator kinerja :

- Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
- Index persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan.

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

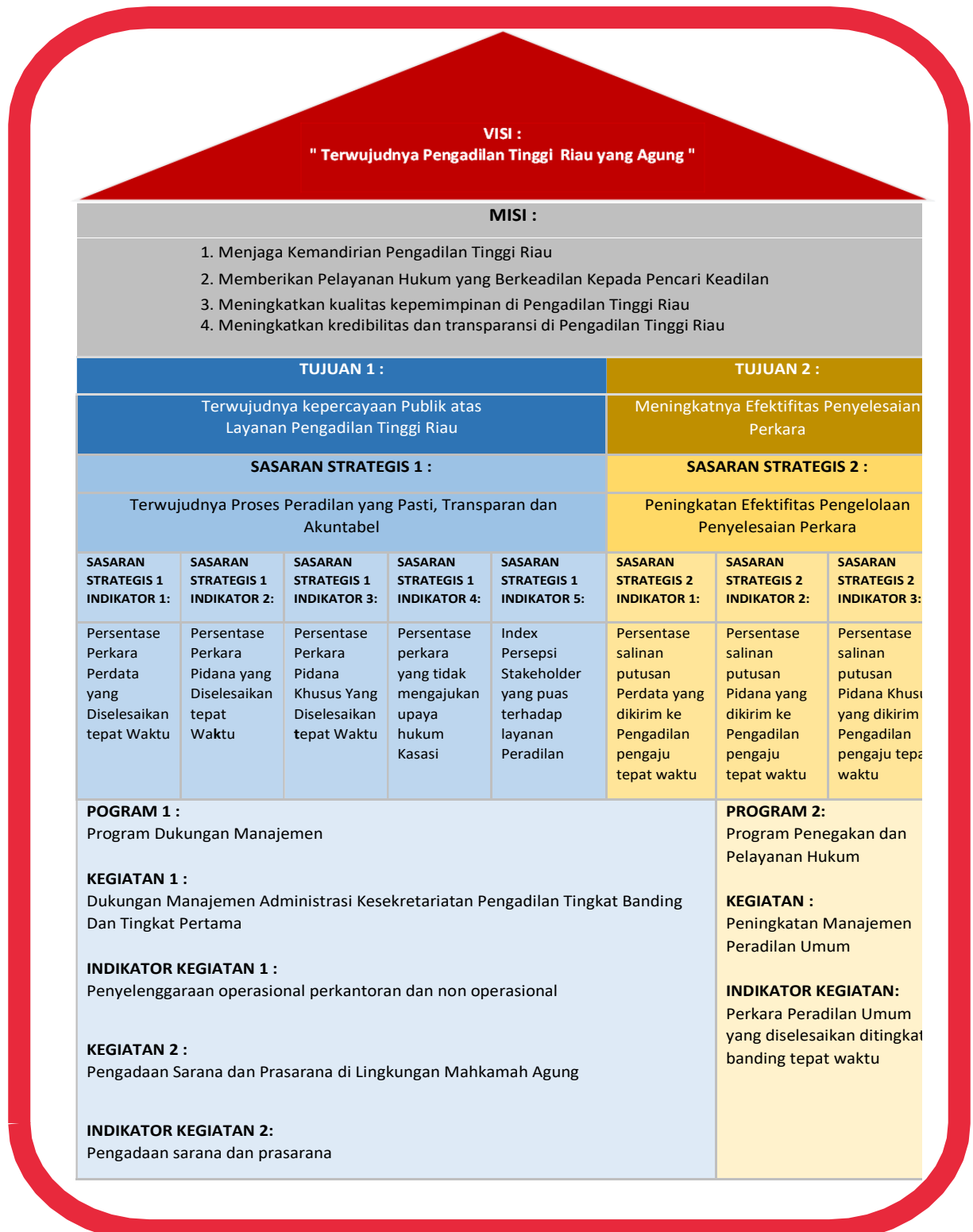
Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan tingkat banding tepat waktu.

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum mendukung capaian indikator kinerja :

- Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
- Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.
- Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.

Gambar 3. Framework Rencana Strategis Tahun 2020-2024



Tabel 4. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

TUJUAN			SASARAN							STRATEGIS				
NO	URAIAN	TARGET JANGKA	URAIAN	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp.
1	Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Pelayanan Pengadilan Tinggi Riau	93%	1 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	1 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	86%	87%	95%	96%	97%	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional	5 layanan	120.000.000.000
		93%		2 Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	88%	90%	95%	96%	97%					
		97%		3 Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	91%	92%	100%	100%	100%					
		44%		4 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	51%	52%	37%	40%	40%					
		93%		5 Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap Layanan Peradilan	87%	88%	95%	96%	97%				5 layanan	2.000.000.000
2	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100%	2 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan tingkat banding tepat waktu	5.000 perkara	1.800.000.000
		100%		2 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		100%		3 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					

Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Riau memuat angka target kinerja tahun 2024 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2024. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentangkinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

Tabel 5. Rencana Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu		97%
		2	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu		97%
		3	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu		100%
		4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		40%
		5	Index Persepsi <i>Stakeholder</i> yang Puas Terhadap Layanan Peradilan		97%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu		100%
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu		100%
		3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu		100%

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja peta strategi, sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1 Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu.	97%
		2 Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu.	97%
		3 Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu.	100%
		4 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	40%
		5 Index Persepsi <i>Stakeholder</i> yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.	97%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		2 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		3 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%

1. Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Rp. 26.848.880.000,00
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 235.514.000,00



Bab III

Akuntabilitas Kinerja

- **Capaian Kinerja Organisasi**

- ✚ *Capaian Kinerja Tahun 2024*
- ✚ *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja*
- ✚ *Realisasi Kinerja dibandingkan Tahun Sebelumnya*
- ✚ *Realisasi Kinerja dibandingkan Target Jangka Menengah*
- ✚ *Realisasi Kinerja dibandingkan Level Nasional*
- ✚ *Analisis Efisiensi Sumber Daya*

- **Realisasi Anggaran**



Email
admin@pt-riau.go.id



Website
pt-riau.go.id

Capaian Kinerja Organisasi

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2024 sebesar **101,4%**. Capaian kinerja ini diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024. Secara umum capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2024 telah mencapai target kinerja dan dinyatakan “Berhasil”. Dari 8 (delapan) indikator kinerja utama pada 2 (dua) Sasaran Strategis, seluruh indikator dinyatakan telah mencapai target, bahkan beberapa indikator melebihi target.

Sasaran Strategis 1 “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” telah memenuhi capaian $\geq 100\%$ yaitu sebesar 102,7%, sedangkan Sasaran Strategis 2 “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” telah mempertahankan capaian yang selalu diperoleh setiap tahun yaitu sebesar 100%. Hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1 Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	97,0%	100,0%	103,1%
		2 Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	97,0%	100,0%	103,1%
		3 Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100,0%	100,0%	100,0%
		4 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40,0%	41,8%	104,5%
		5 Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97,0%	99,9%	103,0%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1		102,7%	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100,0%	100,0%	100,0%
		2 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100,0%	100,0%	100,0%
		3 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100,0%	100,0%	100,0%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2		100,0%	
Rata - Rata Capaian KinerjaSasaran Strategis 1 dan 2			101,4%		

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA



SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	97,0%	100,0%	103,1%
2. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	97,0%	100,0%	103,1%
3. Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	100,0%	100,0%	100,0%
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	40,0%	41,8%	104,5%
5. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97,0%	99,9%	103,0%
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1			102,7%

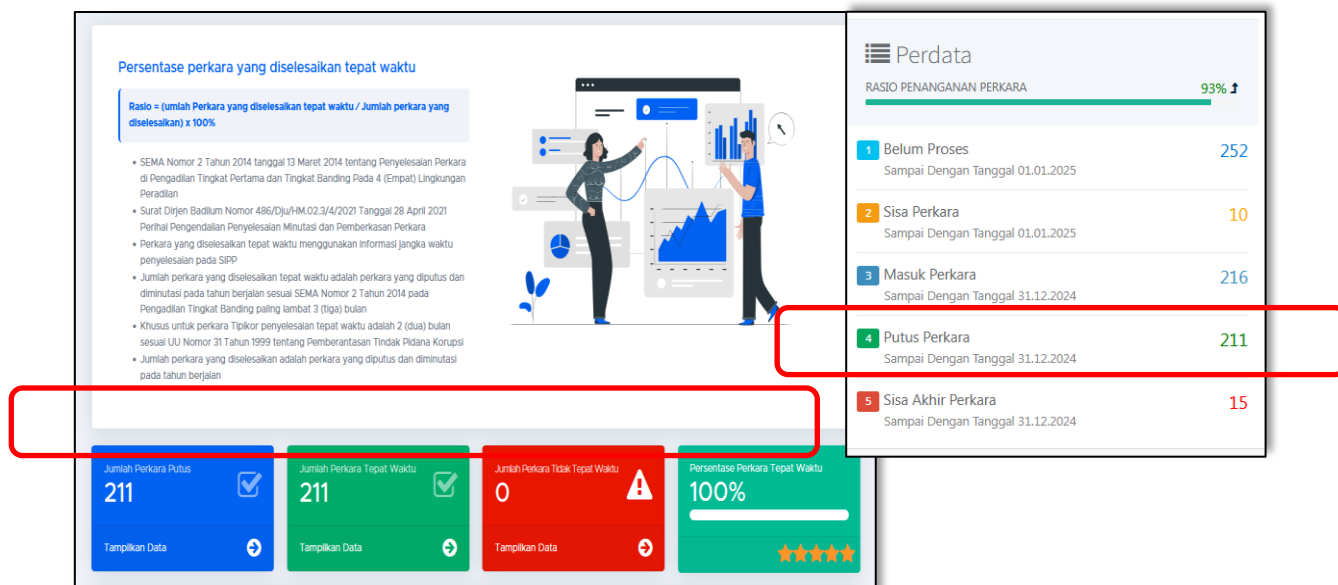
Sasaran 1- Indikator 1

Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat banding.

Jumlah penyelesaian perkara ini dihitung secara sistematis melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Tingkat Banding Mahkamah Agung RI, dan pengukuran kinerjanya diukur melalui aplikasi Evakip Pengadilan Tinggi Riau yang dapat diakses melalui alamat <https://evakip.pt-pekanbaru.go.id>. Berdasarkan data pada aplikasi SIPP, jumlah perkara perdata Pengadilan Tinggi Riau yang putus tahun 2024 sebanyak 211 perkara, dan berdasarkan pengukuran kinerja pada aplikasi Evakip Pengadilan Tinggi Riau, seluruh perkara perdata yang putus tersebut diselesaikan tepat waktu tidak melebihi 3 bulan. Realisasi indikator ini sebesar 100%, dan melebihi target 97%, sehingga capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mencapai 103,1%.

Gambar 4. Pengukuran capaian indikator “Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu”



Rincian jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dari bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini.

Tabel 8. Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu

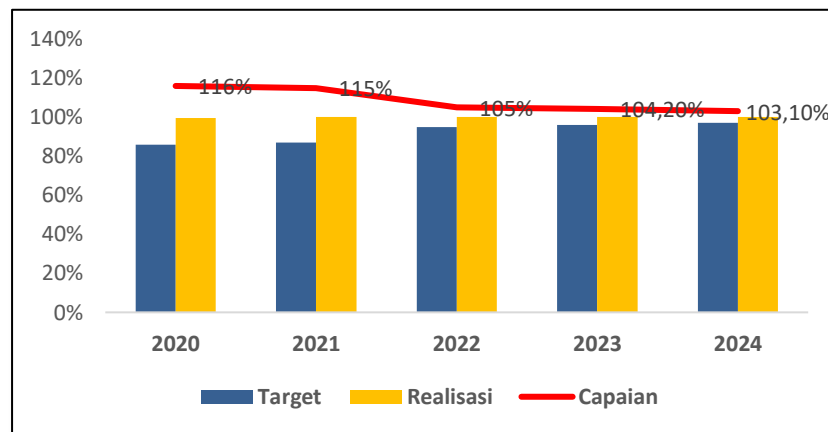
Bulan	Perkara Perdata yang Putus Tahun 2024	Perkara Perdata yang Putus Tepat Waktu Tahun 2024	Realisasi Persentase Perkara Perdata yang Putus Tepat Waktu
Januari	9	9	100%
Februari	26	26	100%
Maret	19	19	100%
April	10	10	100%
Mei	15	15	100%
Juni	20	20	100%
Juli	20	20	100%
Agustus	27	27	100%
September	16	16	100%
Oktober	18	18	100%
November	11	11	100%
Desember	20	20	100%
Jumlah	211	211	100%

Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, realisasi kinerja perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 adalah sama sebesar 100%, dan realisasi ini telah dipertahankan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Sesuai Renstra Tahun 2020-2024, karena trendnya setiap tahun target kinerja meningkat dan target 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga capaian kinerja indikator ini pada tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, seperti dijelaskan pada Tabel 9 dan Grafik 1.

Tabel 9. Capaian Indikator Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	2024	211	211	97%	100%	103,1%
	2023	195	195	96%	100%	104,2%
	2022	259	259	95%	100%	105%
	2021	256	256	87%	100%	115%
	2020	274	273	86%	99,6%	116%

Grafik 1. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 s.d 2024



Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2021 hingga tahun 2024, Pengadilan Tinggi Riau telah berhasil dan konsisten mempertahankan kinerja penyelesaian perkara perdata tepat waktu sehingga selalu terealisasi 100%.

Tabel 10. Capaian Indikator Persentase Perkara Perdata Tepat Waktu Th. 202 s.d 2024 dibandingkan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	2024	211	211	93%	100%	107,5%
	2023	195	195	93%	100%	107,5%
	2022	259	259	93%	100%	107,5%
	2021	256	256	93%	100%	107,5%
	2020	274	273	93%	99,6%	107,1%

Realisasi indikator penyelesaian perkara perdata yang tepat waktu dari tahun 2020 s.d tahun 2024 jika dibandingkan dengan target jangka menengah, telah jauh melewati target dan rata-rata capaian 107,5% seperti dijelaskan pada Tabel 10. Jika dilihat selama beberapa tahun berturut-turut realisasi indikator ini telah stabil pada angka 100%, maka untuk lima tahun kedepan target jangka menengah indikator ini dapat ditetapkan sebesar 100%.

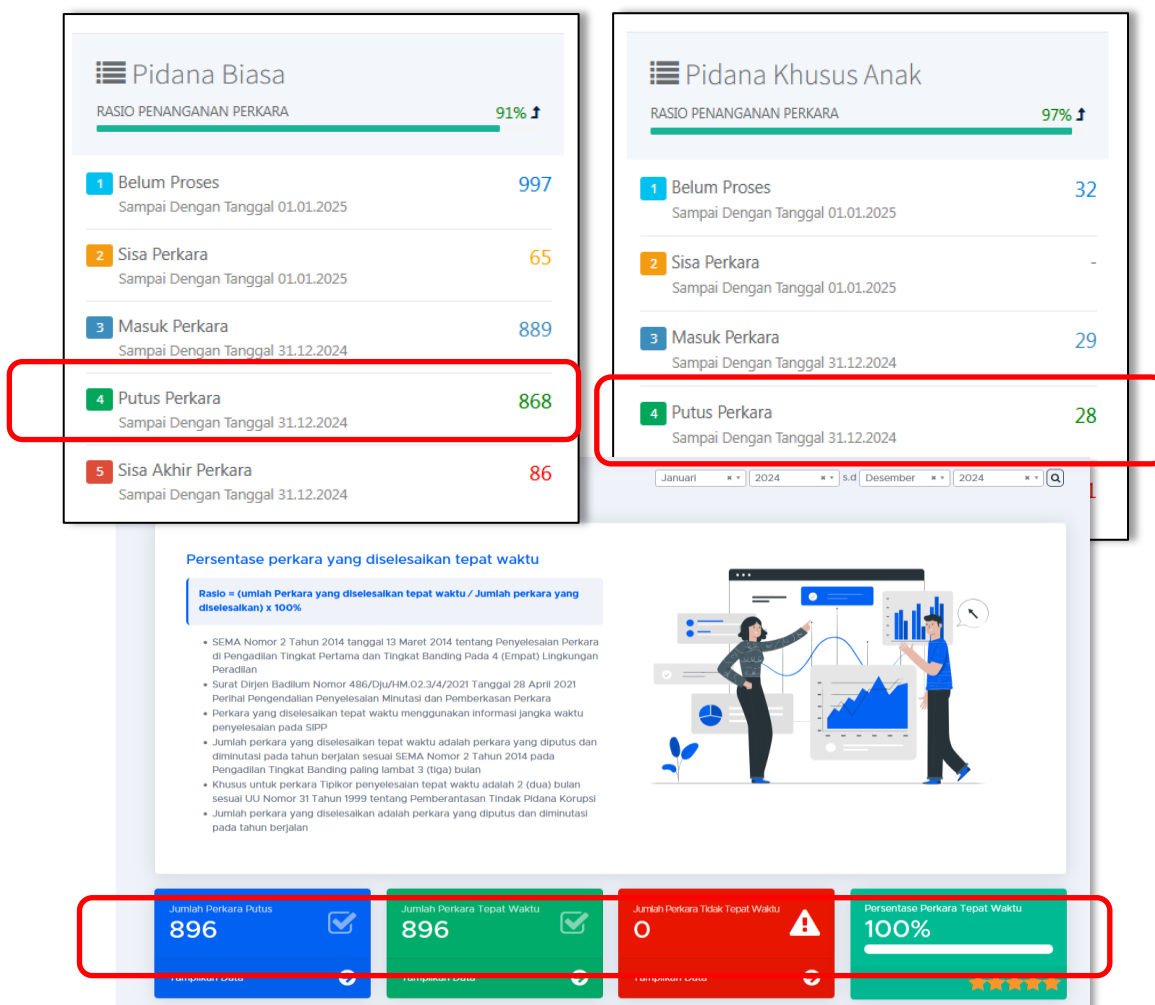
Sasaran 1- Indikator 2

Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada tahun berjalan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat banding.

Berdasarkan data pada aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Tingkat Banding Mahkamah Agung RI, jumlah perkara pidana Pengadilan Tinggi Riau yang putus tahun 2024 sebanyak 896 perkara yang terdiri dari 868 perkara Pidana Biasa dan 28 perkara Pidana Anak. Berdasarkan pengukuran kinerja pada aplikasi Evakip Pengadilan Tinggi Riau yang dapat diakses melalui alamat <https://evakip.pt-pekanbaru.go.id/>, seluruh perkara pidana yang putus tersebut diselesaikan tepat waktu tidak melebihi 3 bulan. Realisasi indikator ini sebesar 100%, dan melebihi target 97%, sehingga capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu mencapai 103,1%.

Gambar 5. Pengukuran capaian indikator “Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu” pada SIPP dan Evakip



Rincian jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dari bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 11 berikut ini.

Tabel 11. Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu bulan Januari s.d Desember 2024

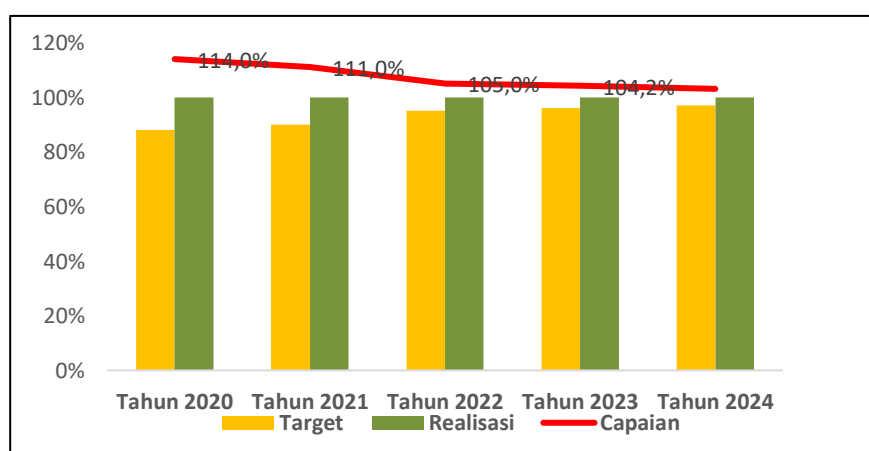
Bulan	Perkara Pidana yang Putus Tahun 2024	Perkara Pidana yang Putus Tepat Waktu Tahun 2024	Realisasi Persentase Perkara Pidana yang Putus Tepat Waktu
Januari	84	84	100%
Februari	74	74	100%
Maret	90	90	100%
April	70	70	100%
Mei	58	58	100%
Juni	65	65	100%
Juli	58	58	100%
Agustus	52	52	100%
September	70	70	100%
Oktober	68	68	100%
November	102	102	100%
Desember	105	105	100%
Jumlah	896	896	100%

Realisasi kinerja perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 adalah sama dengan tahun-tahun sebelumnya sebesar 100%, dan realisasi ini telah dipertahankan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sesuai Renstra Tahun 2020-2024, karena trendnya setiap tahun target kinerja meningkat dan target 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga capaian kinerja indikator ini pada tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 12. Capaian Indikator Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	2024	896	896	97%	100%	103,1%
	2023	730	730	96%	100%	104,2%
	2022	753	753	95%	100%	105%
	2021	717	717	90%	100%	111%
	2020	676	676	88%	100%	114%

Grafik 2. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 s.d 2024



Berdasarkan data pada Tabel 12 dan Grafik 2.dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, Pengadilan Tinggi Riau telah berhasil dan konsisten mempertahankan kinerja penyelesaian perkara pidana tepat waktu sehingga selalu terealisasi 100%.

Tabel 13. Capaian Indikator Persentase Perkara Pidana Tepat Waktu Tahun 2020 s.d 2024 dibandingkan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	2024	896	896	93%	100%	107,5%
	2023	730	730	93%	100%	107,5%
	2022	753	753	93%	100%	107,5%
	2021	717	717	93%	100%	107,5%
	2020	676	676	93%	100%	107,5%

Pada Tabel 13, jika dibandingkan dengan target jangka menengah 93%, realisasi indikator perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dari tahun 2020 s.d tahun 2024 telah jauh melewati target jangka menengah dengan rata-rata capaian sebesar 107,5%. Selama beberapa tahun berturut-turut realisasi indikator ini telah stabil pada angka 100%, maka untuk lima tahun kedepan indikator perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu ini dapat ditetapkan target jangka menengah.sebesar 100%.

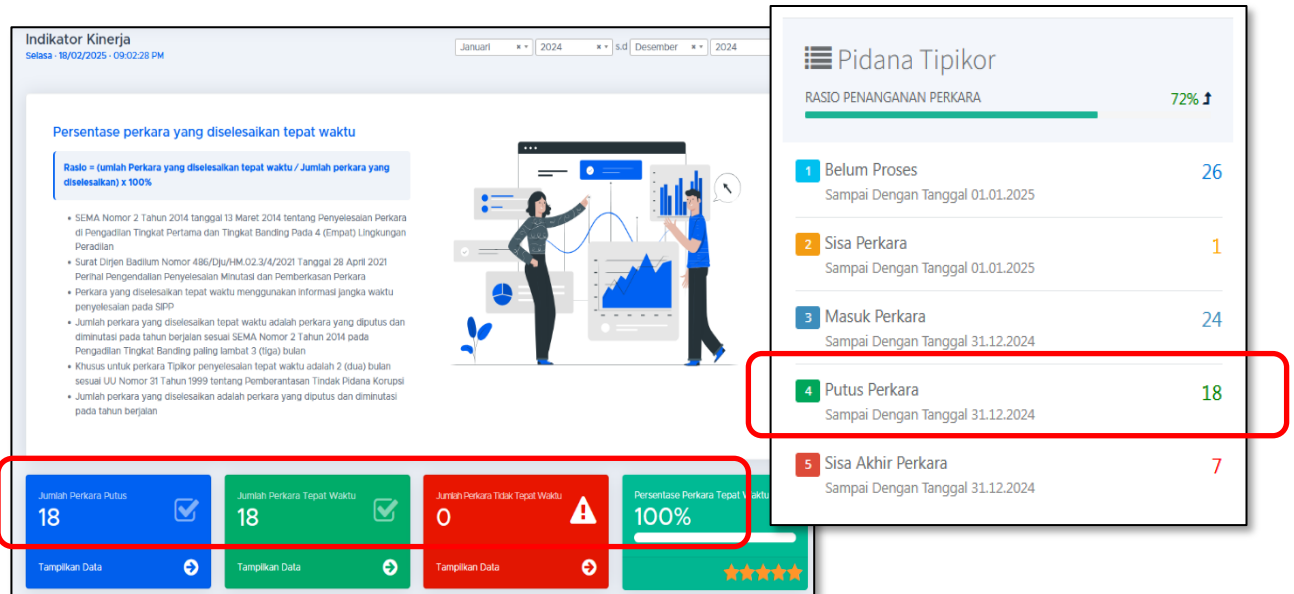
Sasaran 1- Indikator 3

Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada tahun berjalan. Perkara pidana khusus yang ditanganani di Pengadilan Tinggi Riau adalah Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang waktu penyelesaiannya adalah maksimal 60 hari sesuai diatur dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan data pada aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Tingkat Banding Mahkamah Agung RI, jumlah perkara pidana khusus yaitu Pidana Tipikor yang putus pada tahun 2024 sebanyak 18 perkara, dan seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu tidak melebihi 60 hari. Berdasarkan aplikasi Evakip Pengadilan Tinggi Riau yang dapat diakses melalui alamat <https://evakip.pt-pekanbaru.go.id/>, pada tahun 2024 realisasi indikator persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu mencapai target 100% sehingga capaian kinerja yang diperoleh pada indikator ini sebesar 100%.

Gambar 6. Pengukuran capaian indikator “Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu” pada SIPP dan Evakip



Rincian jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu dari bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 14 berikut ini.

Tabel 14. Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu bulan Januari s.d Desember 2024

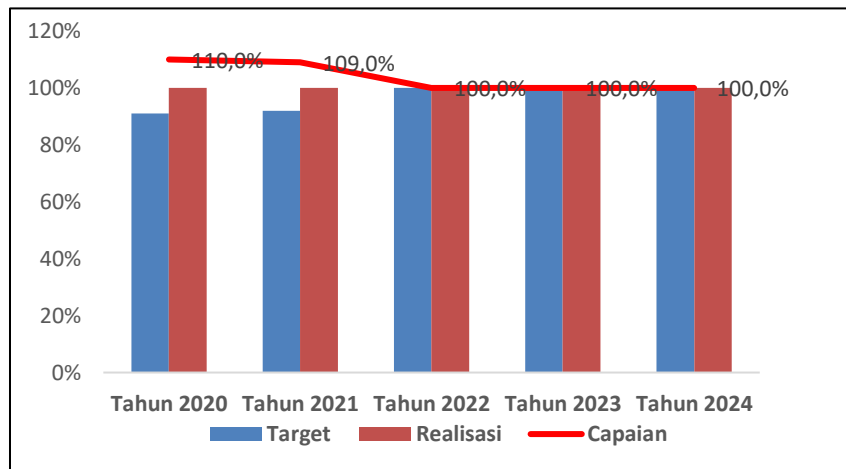
Bulan	Perkara Pidana Khusus yang Putus Tahun 2024	Perkara Pidana Khusus yang Putus Tepat Waktu Tahun 2024	Realisasi Persentase Perkara Pidana Khusus yang Putus Tepat Waktu
Januari	1	1	100%
Februari	1	1	100%
Maret	1	1	100%
April	3	3	100%
Mei	4	4	100%
Juni	0	0	100%
Juli	1	1	100%
Agustus	3	3	100%
September	2	2	100%
Oktober	2	2	100%
November	0	0	100%
Desember	0	0	100%
Jumlah	18	18	100%

Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, realisasi kinerja perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu dapat dipertahankan sebesar 100%. Capaian persentase penyelesaian perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2024 berturut-turut adalah 110%, 109%, 100%, 100%, dan 100%. Indikator ini pada tahun 2022 s.d tahun 2024 telah menetapkan target 100%, sehingga capaian kinerja tahun 2022 s.d tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 15. Capaian Indikator Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Perkara Pidana Khusus Diselesaikan	Perkara Pidana Khusus Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	2024	18	18	100%	100%	100%
	2023	35	35	100%	100%	100%
	2022	33	33	100	100%	100%
	2021	38	38	92%	100%	109%
	2020	24	24	91%	100%	110%

Grafik 3. Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 s.d 2024



Berdasarkan data pada Tabel 15 dan Grafik 3, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, Pengadilan Tinggi Riau telah berhasil dan konsisten mempertahankan kinerja penyelesaian perkara pidana khusus tepat waktu sehingga selalu terealisasi 100%.

Tabel 16. Capaian indikator Persentase Perkara Pidana Khusus Tepat Waktu Th. 2020 s.d 2024 dibandingkan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	2024	896	896	97%	100%	103,1%
	2023	730	730	97%	100%	103,1%
	2022	753	753	97%	100%	103,1%
	2021	717	717	97%	100%	103,1%
	2020	676	676	97%	100%	103,1%

Realisasi indikator perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu dari tahun 2020 s.d tahun 2024 yang selalu terealisasi 100% jika dibandingkan dengan target jangka menengah 97%, memperoleh rata-rata capaian 103,1% seperti dijelaskan pada Tabel 16. Jika dilihat selama beberapa tahun berturut-turut realisasi indikator ini telah stabil pada angka 100%, maka untuk lima tahun kedepan indikator perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu ini akan akan ditetapkan target jangka menengah sebesar 100%.

Hal-hal yang telah dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan kinerja penyelesaian perkara banding baik perkara Perdata, Pidana, maupun Pidana khusus pada tahun 2024 sehingga seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu dan realisasi kinerja mencapai 100% adalah sebagai berikut :

1. Komitmen Pimpinan, beserta jajarannya untuk menyelesaikan perkara banding Pidana, Perdata, maupun Pidana Khusus Tipikor sesuai dengan SOP Kepaniteraan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Badilum melalui SK No. 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022, dan pemberlakuannya telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Tinggi Riau No. W4.U/24/KP.04.05/1/2023.
2. Meningkatkan Standar Layanan, dengan merubah dan menetapkan waktu penyelesaian perkara pidana banding menjadi 90 (sembilan puluh) hari, waktu penyelesaian perkara pidana anak banding menjadi 44 (empat puluh empat) hari., dan waktu penyelesaian perkara perdata menjadi 90 (sembilan puluh) hari.
3. Melakukan pengawasan dalam penyelesaian perkara yang rutin dilakukan setiap bulan dan dibahas dalam rapat bulanan serta ditindaklanjuti.
4. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala oleh Pimpinan dan Hakim Pengawas bidang terhadap penyelesaian perkara melalui monitoring Evakip, Rapat koordinasi, dan Whatsapp Group.
5. Adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara Majelis Hakim, dan aparatur teknis dalam penyelesaian perkara.



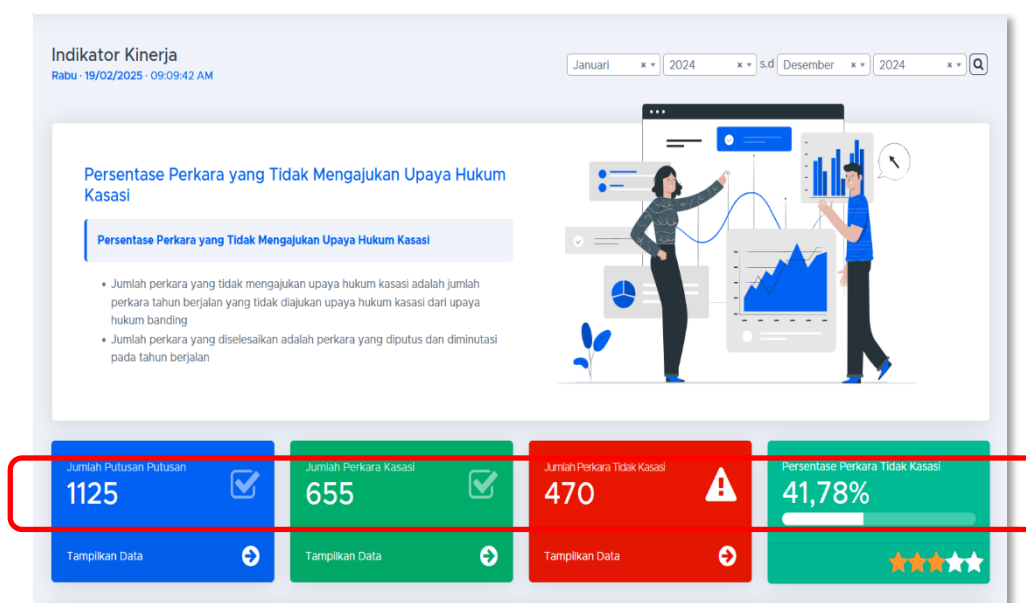
Sasaran 1- Indikator 4

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi” adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan. Secara umum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum kasasi, maka semakin puas atas putusan pengadilan di tingkat banding.

Kasasi adalah upaya hukum untuk mengajukan pembatalan putusan pengadilan tingkat terakhir kepada Mahkamah Agung. Kasasi dapat diajukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan. Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Gambar 7. Pengukuran capaian indikator “Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi” pada Evakip



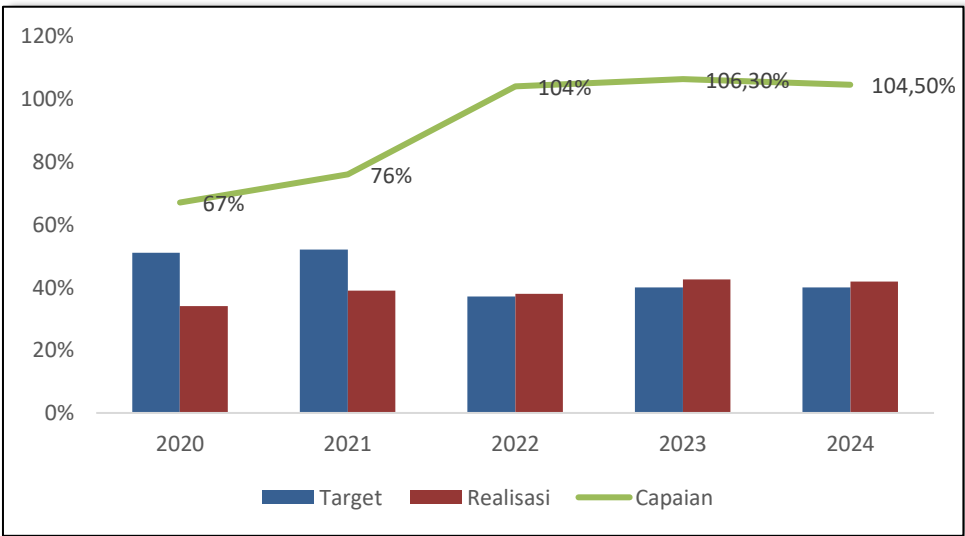
Pada tahun 2024, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah sebesar 41,78%, karena dari 1125 perkara yang diputus di tingkat banding pada tahun 2024, sebanyak 655 perkara mengajukan kasasi dan 470 perkara tidak mengajukan kasasi. Capaian ini diukur secara sistematis menggunakan aplikasi Evakip. Pengadilan Tinggi Riau yang dapat diakses melalui alamat <https://evakip.pt-pekanbaru.go.id/>. Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini pada tahun 2024 adalah sebesar 40%, sehingga realisasi indikator ini sebesar 41,78% telah melewati target, dan memperoleh capaian kinerja sebesar 104,5%.

Capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi berturut turut dari tahun 2020, 2021,2022,2023, dan 2024 adalah sebesar 67%, 76%, 104%, 106,3%, dan 104,5%, dengan rincian pada Tabel 17 dan Grafik 4.

Tabel 17. Capaian Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Th. 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Putus Tahun Berjalan	Jumlah Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	2024	1125	655	470	40%	41,78%	104,5%
	2023	960	552	408	40%	42,5%	106,3%
	2022	1045	644	401	37%	38%	104%
	2021	1012	614	397	52%	39%	76%
	2020	974	640	334	51%	34%	67%

Grafik 4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi



Capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 20204 sebesar 104,5%, lebih rendah jika dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 106,3%. Hal ini disebabkan karena dengan target kinerja yang sama yaitu 40%, namun realisasi tahun 2024 sebesar 41,78% lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 42,5%.

Kondisi yang menyebabkan realisasi indikator ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan realisasi menurun pada bulan Desember 2024. Pada bulan November 2024, realisasi inikator ini masih mencapai 42,8%, namun pada bulan Desember realisasi menurun 41,78 karena bertambahnya perkara yang masuk dan perkara yang mengajukan kasasi.

Setiap bulan Pengadilan Tinggi Riau selalu melakukan monitoring dan evaluasi kinerja melalui aplikasi Evakip agar realisasi indikator kinerja mencapai target dan realisasinya tidak dibawah tahun sebelumnya, dan jika realisasi tidak tercapai dapat dilakukan perubahan target, namun peningkatan perkara yang mengajukan kasasi terjadi pada akhir tahun 2024 bulan Desember,

tidak dapat diprediksi karena berapapun banyak jumlah kasasi dalam perkara yang dimohonkan para pihak berperkara tidak bisa dibatasi oleh Pengadilan. Pengadilan hanya menerima dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya.

Rincian jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi dari perkara yang putus pada tahun 2024 sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada bulan Januari s.d Desember 2024

Periode	Perkara Putus Tahun 2024	Perkara yang Mengajukan Kasasi	Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi	Persentase Perkara yang tidak mengajukan Kasasi
Januari s.d Februari	195	79	116	59,5%
Januari s.d Maret	305	129	176	57,7%
Januari s.d April	388	183	205	52,8%
Januari s.d Mei	465	254	211	45,4%
Januari s.d Juni	550	295	255	46,4%
Januari s.d Juli	629	348	281	44,7%
Januari s.d Agustus	711	407	304	42,8%
Januari s.d September	799	455	344	43,1%
Januari s.d Oktober	887	525	362	40,8%
Januari s.d November	1000	572	428	42,8%
Januari s.d Desember	1125	655	670	41,8%

Sesuai Rencana Strategis Tahun 2020-2024, target jangka menengah dari indikator ini sebesar 44%. Jika dibandingkan target jangka menengah, capaian indikator ini selama tahun 2020 s.d 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 19. Capaian Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Th. 2020 s.d 2024 dibandingkan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Putus Tahun Berjalan	Jumlah Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Target Jangka menengah	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	2024	1125	655	470	44%	41,8%	95,0%
	2023	960	552	408	44%	42,5%	96,6%
	2022	1045	644	401	44%	38%	86,4%
	2021	1012	614	397	44%	39%	88,6%
	2020	974	640	334	44%	34%	77,3%

Berdasarkan data pada Tabel 19, trend realisasi kinerja indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada Th. 2020 s.d 2024 masih dibawah target jangka menengah, namun semakin bertambah tahun realisasinya semakin mendekati target. Dengan demikian target jangka menengah sebesar 44% dapat dijadikan target Renstra kedepannya

Berdasarkan penjelasan sebelumnya secara umum capaian kinerja Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2024 telah berhasil melebihi target yang ditetapkan. Secara umum jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi masih dibawah 50%, dan kondisi ini menunjukkan masyarakat yang puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau diatas 50%.

Hal-hal yang telah dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan Pengadilan Tinggi Riau dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum sehingga indikator Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dapat tercapai adalah :

- a. Melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya aparatur pengadilan, baik Hakim maupun Pegawai, dengan mengikuti sosialisasi atau bimbingan teknis yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ataupun Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung; mengikuti *focus discussion group*, maupun melakukan diskusi internal antar Hakim dan tenaga teknis secara periodik.
- b. Melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan briefing yang dilakukan aparatur teknis secara periodik. Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan Tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan Pengadilan Tinggi Riau.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator kinerja, dan melakukan strategi perubahan rencana target kinerja jika realisasi belum mencapai target kinerja.

Sasaran 1- Indikator 5

Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

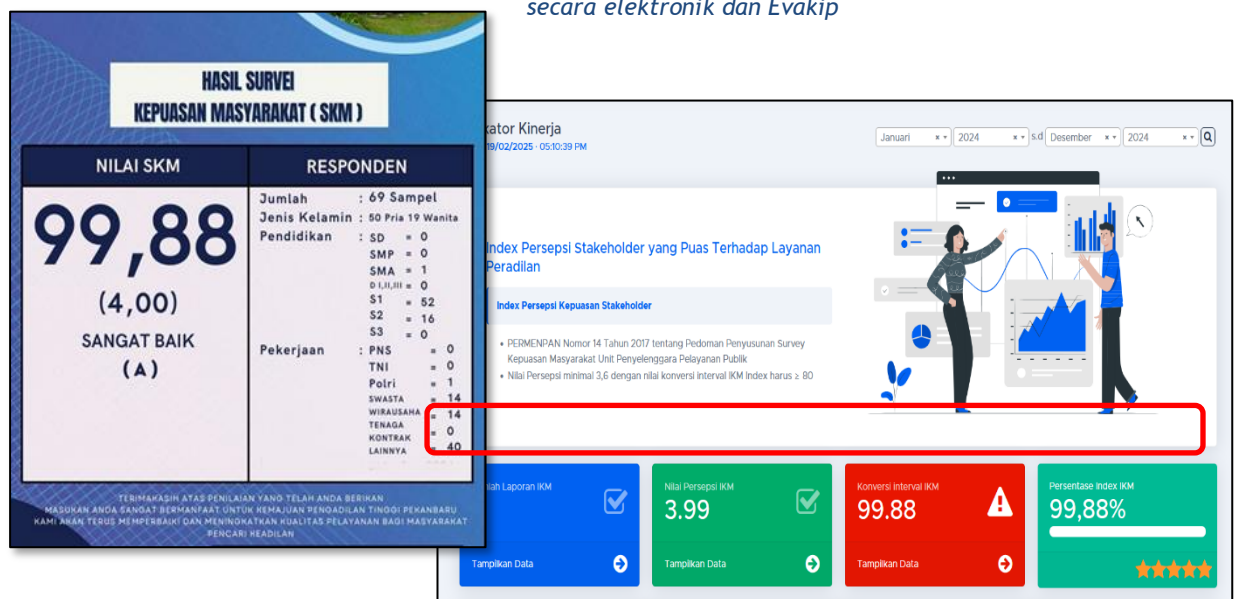
Indikator Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan adalah mengukur persentase Stakeholder (Pengadilan Tingkat Pertama dan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Riau) yang puas terhadap layanan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Riau.. Pengukuran indikator ini mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ruang lingkup yang diukur dalam survey ini terdiri dari 9 komponen, yaitu:

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif

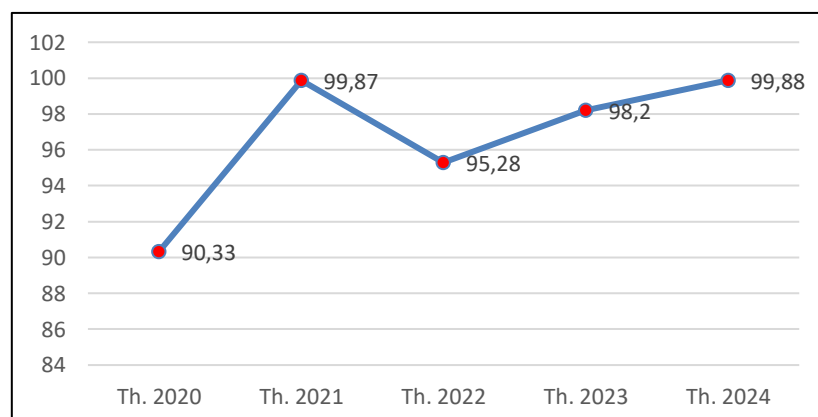
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan survey dan perhitungan hasil survey dilakukan secara elektronik, dengan menggunakan aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Dari hasil survey, Nilai Index Persepsi *Stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Tinggi Riau tahun 2024 melalui survei terhadap 69 responden adalah sebesar **4,00** dan sebagai realisasi dalam nilai konversi interval Indikator Kepuasan Masyarakat sebesar **99,88**.

Gambar 8. Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 secara elektronik dan Evakip



Grafik 5. Realisasi Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020 s.d 2024



Grafik 5 menggambarkan angka Index Persepsi *Stakeholder* yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Pengadilan Tinggi Riau sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang menunjukkan bahwa angka tertinggi tertinggi pada tahun 2024 sebesar 99,88%.

Pada Tahun 2024, target yang ditetapkan pada indikator ini adalah sebesar 97%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 103%. Rincian capaian kinerja indikator Index Persepsi *Stakeholder* yang Puas Terhadap Layanan Peradilan sejak tahun 2020 s.d tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 20. Capaian Kinerja Index Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020 s.d 2024

TAHUN	NO	RUANG LINGKUP	SKOR INTERPRESTASI	KATEGORI	*REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Th. 2020	1	Persyaratan	94,0	Sangat baik	94,0	87	108,0%
	2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	93,5	Sangat baik	93,5	87	107,5%
	3	Waktu Penyelesaian	85,8	Sangat baik	85,8	87	98,6%
	4	Biaya/Tarif	88,0	Sangat Baik	88,0	87	101,1%
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	90,5	Sangat baik	90,5	87	104,0%
	6	Kompetensi Pelaksana	88,0	Sangat baik	88,0	87	101,1%
	7	Perilaku Pelaksana	88,8	Sangat baik	88,8	87	102,0%
	8	Penanganan pengaduan, saran, masukan	97,5	Sangat baik	97,5	87	112,1%
	9	Sarana dan Prasarana	87,0	Sangat baik	87,0	87	100,0%
	Realisasi, Target, dan Capaian Th. 2020				90,33	87	104%
Th. 2021	1	Persyaratan	98,8	Sangat baik	98,8	88	112,3%
	2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	100,0	Sangat baik	100,0	88	113,6%
	3	Waktu Penyelesaian	100,0	Sangat baik	100,0	88	113,6%
	4	Biaya/Tarif	100,0	Sangat Baik	100,0	88	113,6%
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	100,0	Sangat baik	100,0	88	113,6%
	6	Kompetensi Pelaksana	100,0	Sangat baik	100,0	88	113,6%
	7	Perilaku Pelaksana	100,0	Sangat baik	100,0	88	113,6%
	8	Penanganan pengaduan, saran, masukan	100,0	Sangat baik	100,0	88a	113,6%
	9	Sarana dan Prasarana	100,0	Sangat baik	100,0	88	113,6%
	Realisasi, Target, dan Capaian Th. 2021				99,87	88	113%
Th. 2022	1	Persyaratan	94,77	Sangat baik	94,77	95	99,76%
	2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	95,92	Sangat baik	95,92	95	100%
	3	Waktu Penyelesaian	93,6	Sangat baik	93,6	95	98,52%
	4	Biaya/Tarif	96,5	Sangat Baik	96,5	95	98,44%
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	95,92	Sangat baik	95,92	95	99,04%
	6	Kompetensi Pelaksana	94,17	Sangat baik	94,17	95	99,12%
	7	Perilaku Pelaksana	92,45	Sangat baik	92,45	95	97,31%
	8	Penanganan pengaduan, saran, masukan	93,35	Sangat baik	93,35	95	98,26%
	9	Sarana dan Prasarana	98,82	Sangat baik	98,82	95	104,02%
	Realisasi, Target, dan Capaian Th. 2022				95,28	95	100%
Th. 2023	1	Persyaratan	98,77	Sangat baik	98,77	96	99,76%
	2	Sistem, Mekanisme dan	97,32	Sangat baik	97,32	96	100%

Th. 2024	Prosedur					
	3	Waktu Penyelesaian	98,9	Sangat baik	98,9	96 98,52%
	4	Biaya/Tarif	97,32	Sangat Baik	97,32	96 98,44%
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	98,7	Sangat baik	98,7	96 99,04%
	6	Kompetensi Pelaksana	98,17	Sangat baik	98,17	96 99,12%
	7	Perilaku Pelaksana	98,8	Sangat baik	98,8	96 97,31%
	8	Penanganan pengaduan, saran, masukan	99,35	Sangat baik	99,35	96 98,26%
	9	Sarana dan Prasarana	96,05	Sangat baik	96,05	96 104,02%
	Realisasi, Target, dan Capaian Th. 2023				98,2	96 102,2%
	1	Persyaratan	100	Sangat baik	100	97 103%
	2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	100	Sangat baik	100	97 103%
	3	Waktu Penyelesaian	100	Sangat baik	100	97 103%
	4	Biaya/Tarif	100	Sangat Baik	100	97 103%
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	100	Sangat baik	100	97 103%
	6	Kompetensi Pelaksana	99,65	Sangat baik	99,65	97 102,73%
	7	Perilaku Pelaksana	99,27	Sangat baik	99,27	97 102,34%
	8	Penanganan pengaduan, saran, masukan	100	Sangat baik	100	97 103%
	9	Sarana dan Prasarana	100	Sangat baik	100	97 103%
	Realisasi, Target, dan Capaian Th. 2024				99,88	97 103,0%

Target jangka menengah indikator Index Persepsi *Stakeholder* yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada Renstra Tahun 2020 s.d 2024, adalah sebesar 93%.

Tabel 21. Capaian Indikator Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan Th. 2020 s.d 2024 jika dibandingkan target jangka menengah

Indikator Kinerja	Tahun	Target Jangka menengah	Realisasi	Capaian
Index Persepsi <i>Stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	2024	93%	99,88%	107,40%
	2023	93%	98,20%	105,59%
	2022	93%	95,28%	102,45%
	2021	93%	99,87%	107,39%
	2020	93%	90,33%	97,13%

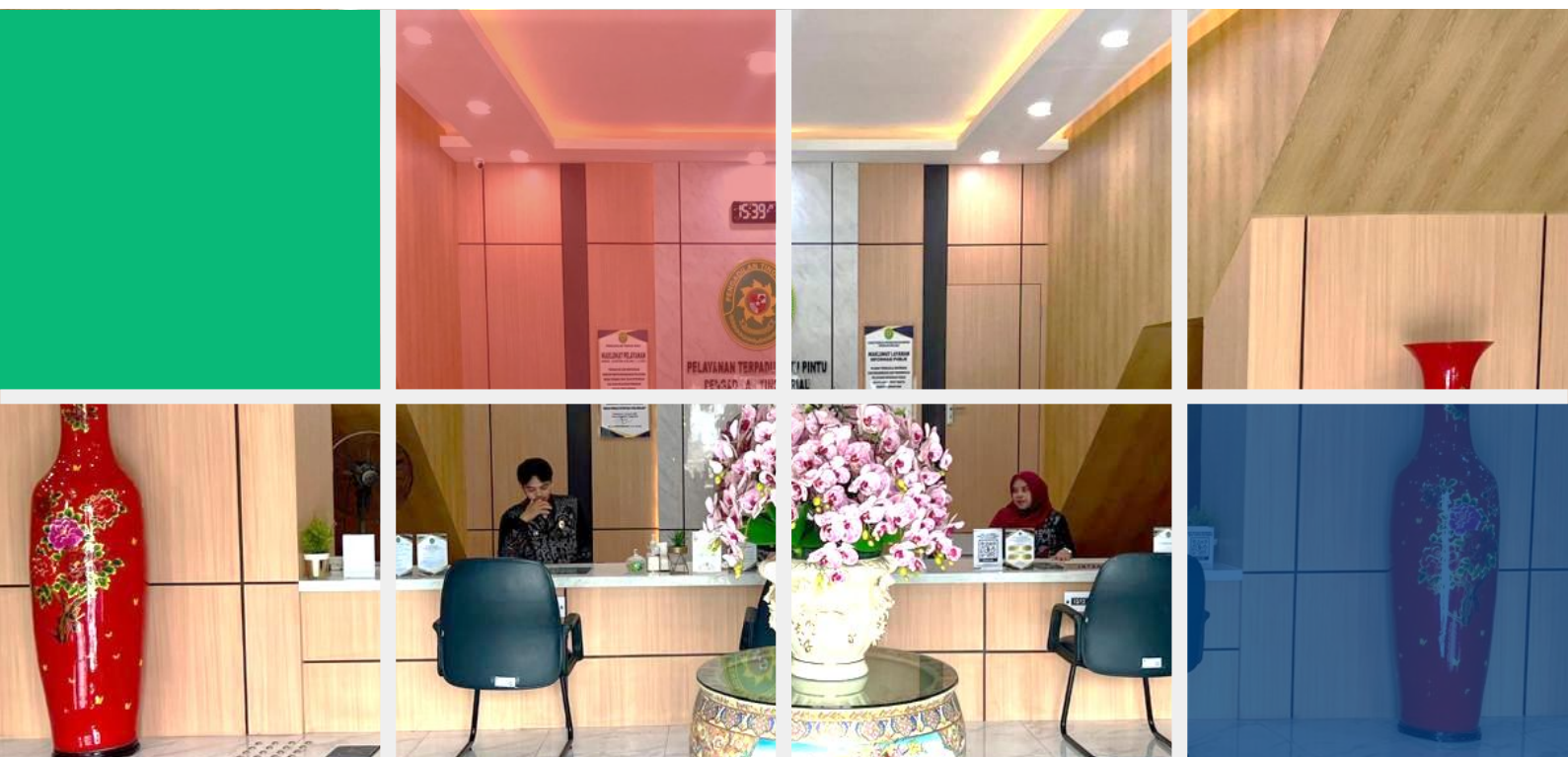
Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja Index Persepsi *Stakeholder* yang Puas Terhadap Layanan Peradilan jika diukur menggunakan target menengah, trednya semakin meningkat, dan pada tahun 2024 realisasinya telah melebihi target jangka menengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa target jangka menengah telah berhasil dicapai bahkan lebih tinggi, sehingga untuk periode 5 tahun berikutnya, target tersebut dapat ditingkatkan

Dari data capaian kinerja Index Persepsi *Stakeholder* yang puas terhadap layanan Peradilan pada Pengadilan Tinggi diatas, menunjukkan bahawa setiap tahun Pengadilan Tinggi Riau

telah berhasil meningkatkan kepuasan *stakeholder* pengguna layanan pengadilan dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Hal-hal yang telah dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan meningkatkatnya Index Persepsi *Stakeholder* yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik. Pada tahun 2024 Pengadilan Tinggi Riau memperluas ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta menambah dan memperindah fasilitas ruang PTSP sehingga memberikan kenyamanan bagi pengunjung PTSP
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang melayani masyarakat pengguna layanan Pengadilan, melalui Briefing, Bimtek, Training Service Excellent, Pelatihan Pelayanan Disabilitas,
3. Membangun inovasi Ruang Pelayanan Publik dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terpantau, untuk mencegah pelanggaran dan penyimpangan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan secara aman dan nyaman
4. Optimalisasi inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi
5. Meningkatkan Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan
6. Pengawasan serta monitoring dan evaluasi pelayanan PTSP yang dilaksanakan secara periodik dan ditindaklanjuti.
7. Pemberian reward dan punishment bagi aparatur pelayanan publik



SASARAN STRATEGIS 2



Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100,0%	100,0%	100,0%
2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100,0%	100,0%	100,0%
3. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100,0%	100,0%	100,0%
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2			100,0%

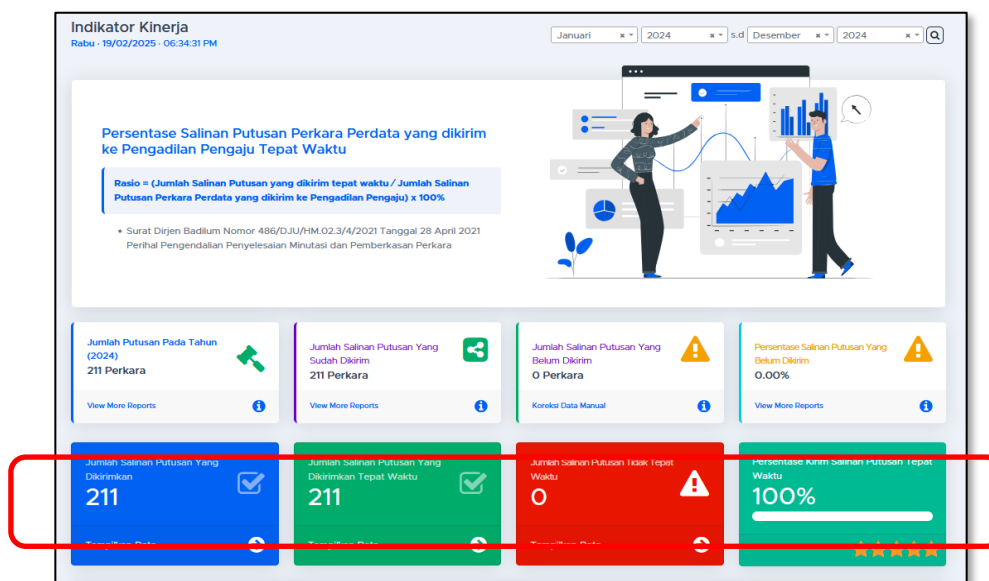
Sasaran 2- Indikator 1

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim. Pengiriman salinan putusan tepat waktu mengacu pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi & Pemberkasan Perkara dan Surat Edaran No. 1 Tahun Tahun 2011 tentang Penyampaian dan Salinan Putusan, yaitu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan. Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim adalah jumlah salinan putusan pada perkara perdata yang sudah putus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Pada tahun 2024 jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 211 perkara, dan seluruh salinan putusan perkara perdata tersebut dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu, sehingga realisasi indikator ini mencapai target 100%, dan memperoleh capaian 100%.Capaian ini diukur secara sistematis menggunakan aplikasi pengukuran kinerja Evakip Pengadilan Tinggi Riau.

Gambar 9. Pengukuran capaian indikator “Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu” pada Evakip



Pada umumnya Pengadilan Tinggi Riau mengirim salinan putusan perkara perdata ke Pengadilan pengaju melalui email atau melalui ekspedisi setelah perkara diputus, dan tanggal pengiriman salinan putusan diinputkan ke SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Salinan putusan dikirim ke Pengadilan pengaju paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan, dengan demikian kinerja Pengadilan Tinggi Riau untuk mengirim salinan putusan tersebut selalu tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan efektifitas Pengadilan Tinggi Riau dalam pengiriman salinan putusan perkara perdata.

Berikut tabel rincian pengiriman salinan putusan perkara perdata ke pengadilan selama tahun 2024.

Tabel 22. Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2024

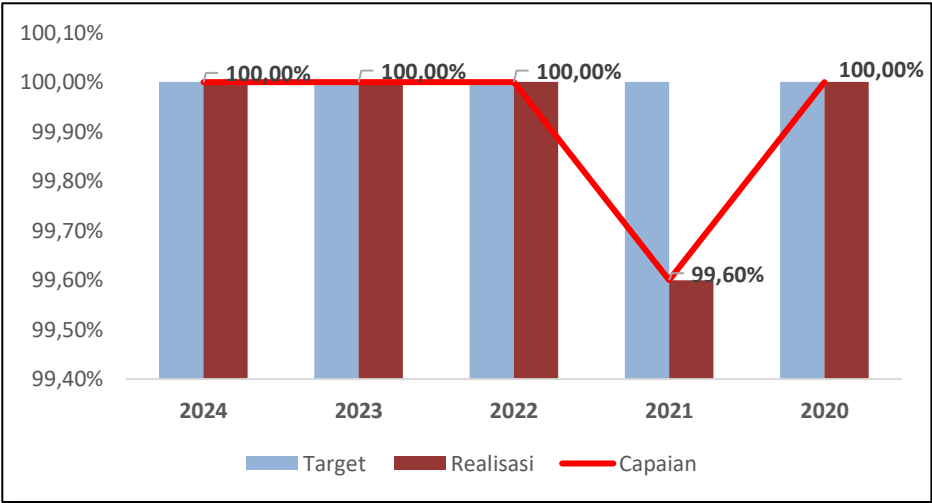
No.	Bulan	Jumlah Salinan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju	Jumlah Salinan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Jumlah Salinan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tidak Tepat Waktu	% Realisasi
1	Januari	9	9	0	100%
2	Februari	26	26	0	100%
3	Maret	19	19	0	100%
4	April	10	10	0	100%
5	Mei	15	15	0	100%
6	Juni	20	20	0	100%
7	Juli	20	20	0	100%
8	Agustus	27	27	0	100%
9	September	16	16	0	100%
10	Oktober	18	18	0	100%
11	November	11	11	0	100%
12	Desember	20	20	0	100%
Jumlah		211	211	0	100%

Capaian indikator pengiriman salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu berturut-turut dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 adalah sebesar 100%, 99,6%, 100%, 100%, dan 100%, sebagaimana dirinci pada Tabel 23.

Tabel 23. Capaian indikator “Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Perdata ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	2024	211	211	100%	100%	100%
	2023	195	195	100%	100%	100%
	2022	259	259	100%	100%	100%
	2021	256	255	100%	99,6%	99,6%
	2020	274	274	100%	100%	100%

Grafik 6. Capaian indikator “Persentase P Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu” Tahun 2020 s.d 2024



Grafik 6 menggambarkan konsistensi Pengadilan Tinggi Riau untuk mempertahankan kinerja pengiriman salinan putusan perkara perdata tepat waktu sehingga pada tahun 2024 tetap mencapai target 100% seperti tahun sebelumnya.

Pada Renstra 2020-2024, target jangka menengah yang ditetapkan untuk indikator pengiriman salinan putusan perkara perdata tepat waktu, sebesar 100%. Target jangka menengah tersebut sudah berhasil dicapai indikator ini secara konsisten dari tahun 2022 hingga tahun 2024.

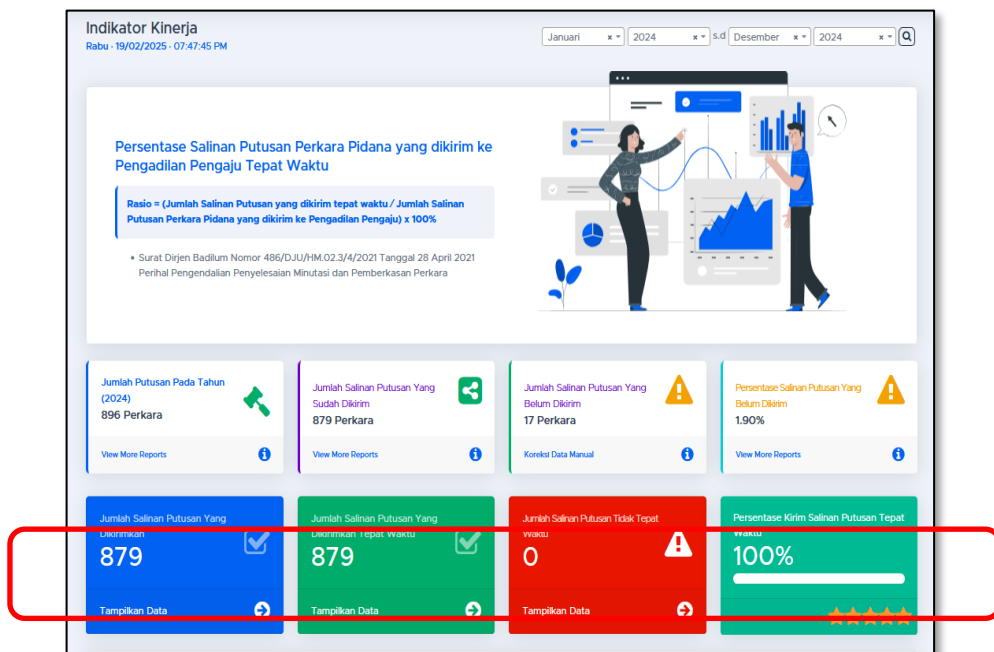
Sasaran 2- Indikator 2

Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim. Pengiriman salinan putusan tepat waktu mengacu pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi & Pemberkasan Perkara dan Surat Edaran No. 1 Tahun Tahun 2011 tentang Penyampaian dan Salinan Putusan, yaitu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan. Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim adalah jumlah salinan putusan pada perkara pidana yang sudah putus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Pada tahun 2024 jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 879 perkara, dan seluruh salinan putusan perkara pidana tersebut dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu, sehingga realisasi indikator ini mencapai target 100%, dan memperoleh capaian 100%.Capaian ini diukur secara sistematis menggunakan aplikasi pengukuran kinerja Evakip Pengadilan Tinggi Riau.

Gambar 10. Pengukuran capaian indikator kinerja “ Persentase Salinan Putusan perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu” pada Evakip



Pengiriman salinan putusan perkara pidana khusus ke pengadilan pengaju selama tahun 2024 dari bulan Januari sampai dengan Desember dirinci pada Tabel 24.

Tabel 24. Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju pada tahun 2024

No.	Bulan	Jumlah Salinan Perkara Peidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju	Jumlah Salinan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Jumlah Salinan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pangadilan Pengaju Tidak Tepat Waktu	% Realisasi
1	Januari	84	9	0	100%
2	Februari	74	74	0	100%
3	Maret	90	90	0	100%
4	April	61	61	0	100%
5	Mei	52	52	0	100%
6	Juni	63	63	0	100%
7	Juli	58	58	0	100%
8	Agustus	52	52	0	100%
9	September	70	70	0	100%
10	Oktober	68	68	0	100%
11	November	102	102	0	100%
12	Desember	105	105	0	100%
Jumlah		879	879	0	100%

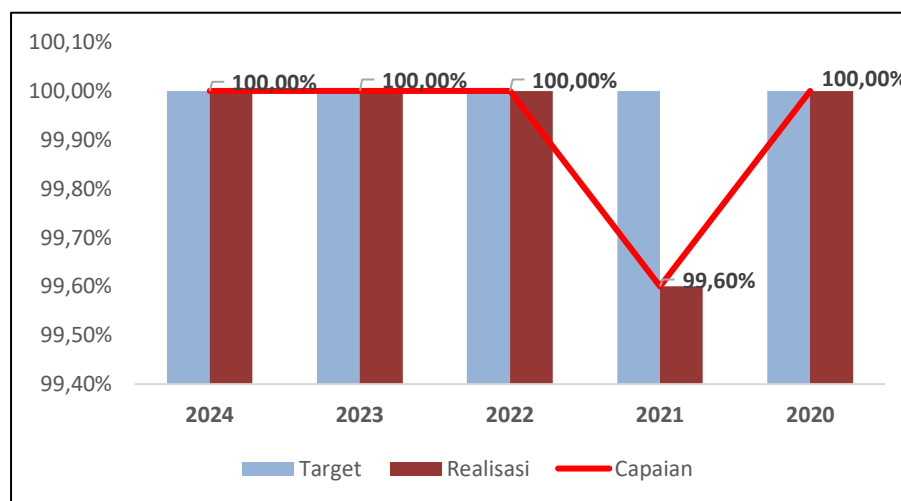
Capaian indikator pengiriman salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu berturut-turut dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 adalah sebesar 100%, 99,6%, 100% 100%, dan 100%, sebagaimana dirinci pada Tabel 25.

Tabel 25. Capaian indikator “Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu” Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	2024	879	879	100%	100%	100%
	2023	730	730	100%	100%	100%
	2022	753	753	100%	100%	100%
	2021	717	714	100%	99,6%	99,6%
	2020	676	676	100%	100%	100%

Pengadilan Tinggi Riau telah konsisten untuk mempertahankan kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana ke Pengadilan pengaju tepat waktu, sehingga pada tahun 2024 tetap mencapai target 100% seperti tahun sebelumnya, kondisi ini tergambar pada Grafik 7.

Grafik 7. Capaian indikator “Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Tepat Waktu” Tahun 2020 s.d 2024



Pada Renstra 2020-2024, target jangka menengah yang ditetapkan untuk indikator pengiriman salinan putusan perkara pidana tepat waktu, sebesar 100%. Target jangka menengah tersebut sudah berhasil dicapai indikator ini secara konsisten dari tahun 2022 hingga tahun 2024.

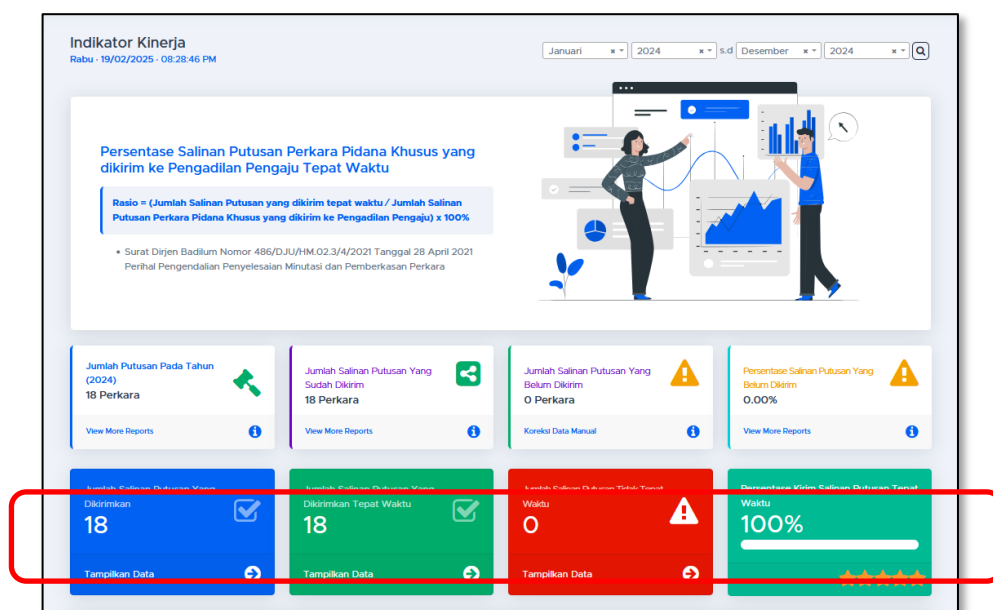
Sasaran 2- Indikator 3

Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim. Pengiriman salinan putusan tepat waktu mengacu pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi & Pemberkasan Perkara dan Surat Edaran No. 1 Tahun Tahun 2011 tentang Penyampaian dan Salinan Putusan, yaitu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan. Jumlah salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim adalah jumlah salinan putusan pada perkara pidana yang sudah putus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Pidana khusus pada Pengadilan Tinggi Riau adalah Pidana Tipikor (Tindak Pidana Korupsi). Pada tahun 2024 jumlah salinan putusan perkara Pidana Tipikor yang dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 18 perkara, dan seluruh salinan putusan perkara Pidana Tipikor tersebut dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu, sehingga realisasi indikator ini mencapai target 100%, dan memperoleh capaian 100%.Capaian ini diukur secara sistematis menggunakan aplikasi pengukuran kinerja Evakip Pengadilan Tinggi Riau.

Gambar 11. Pengukuran capaian indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu” pada Evakip



Pengiriman salinan putusan perkara pidana khusus yaitu Pidana Tipikor ke pengadilan pengaju selama tahun 2024 dari bulan Januari sampai dengan Desember dirinci pada tabel berikut.

Tabel 26. Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Tipikor yang dikirim ke Pengadilan Pengaju pada tahun 2024

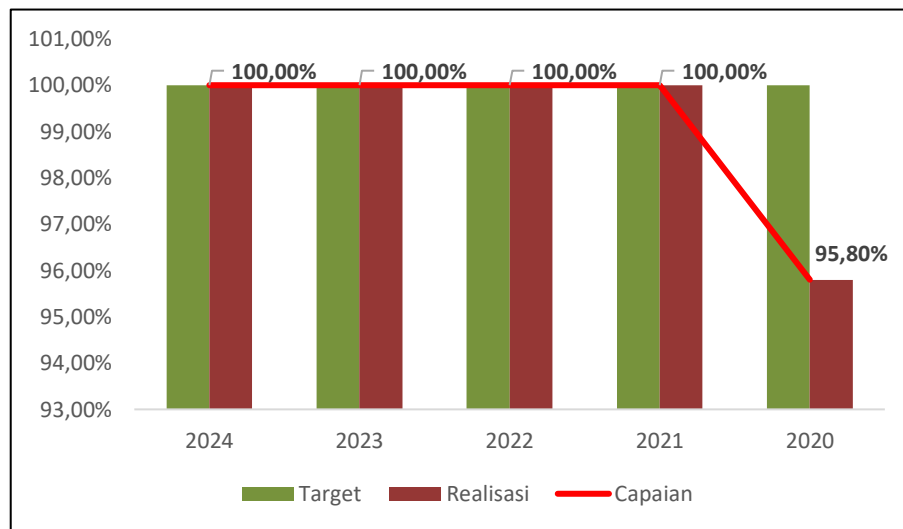
No.	Bulan	Jumlah Salinan Perkara Tipikor yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju	Jumlah Salinan Perkara Tipikor yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Jumlah Salinan Perkara Tipikor yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tidak Tepat Waktu	% Realisasi
1	Januari	1	1	0	100%
2	Februari	1	1	0	100%
3	Maret	1	1	0	100%
4	April	3	3	0	100%
5	Mei	4	4	0	100%
6	Juni	0	0	0	0
7	Juli	1	1	0	100%
8	Agustus	3	3	0	100%
9	September	2	2	0	100%
10	Oktober	2	2	0	100%
11	November	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0
Jumlah		18	18	0	100%

Capaian indikator pengiriman salinan putusan perkara Pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu berturut-turut dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 adalah sebesar 95,8%, 100%, 100%, 100%, dan 100%.

Tabel 27. Capaian indikator “Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu” Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	2024	18	18	100%	100%	100%
	2023	35	35	100%	100%	100%
	2022	33	33	100%	100%	100%
	2021	38	38	100%	100%	100%
	2020	24	23	100%	95,8%	95,8%

Grafik 8. Capaian indikator “Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Tepat Waktu” Tahun 2020 s.d 2024



Tabel 27 dan Grafik 8 menggambarkan konsistensi Pengadilan Tinggi Riau untuk mempertahankan kinerja pengiriman salinan putusan perkara Pidana Khusus ke Pengadilan pengaju tepat waktu, sehingga pada tahun 2024 tetap mencapai target 100% seperti tahun sebelumnya.

Target jangka menengah yang ditetapkan untuk indikator pengiriman salinan putusan perkara pidana khusus tepat waktu pada Renstra 2020-2024, sebesar 100%. Target jangka menengah tersebut sudah berhasil dicapai indikator ini secara konsisten dari tahun 2021 hingga tahun 2024.

Capaian indikator kinerja salinan putusan yang dikirim ke ke Pengadilan Pengaju tepat waktu baik untuk perkara Perdata, Pidana, dan Pidana Khusus pada tahun 2024 seluruhnya dapat mencapai target 100%. Capaian kinerja ini dapat dipertahankan sejak beberapa tahun sebelumnya.

Hal-hal yang mendukung keberhasilan tercapainya kinerja pada indikator salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu baik untuk perkara Perdata, Pidana, dan Pidana Khusus adalah :

1. Implementasi regulasi pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Pengaju berdasarkan “Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun Tahun 2011 tentang Penyampaian dan Salinan Putusan, yaitu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan”.
2. Implementasi “Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi & Pemberkasan Perkara”.
3. Implementasi SOP Kepaniteraan yang dikeluarkan Badilum melalui “SK No.21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri”.
4. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Riau didalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dalam pengiriman salinan putusan
5. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi yang dilaksanakan secara periodik, berkelanjutan, dan ditindaklanjuti
6. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk efisiensi dan efektivitas pengiriman salinan putusan melalui email sebelum pengiriman *hardcopy*.



REALISASI KINERJA DIBANDINGKAN TAHUN SEBELUMNYA

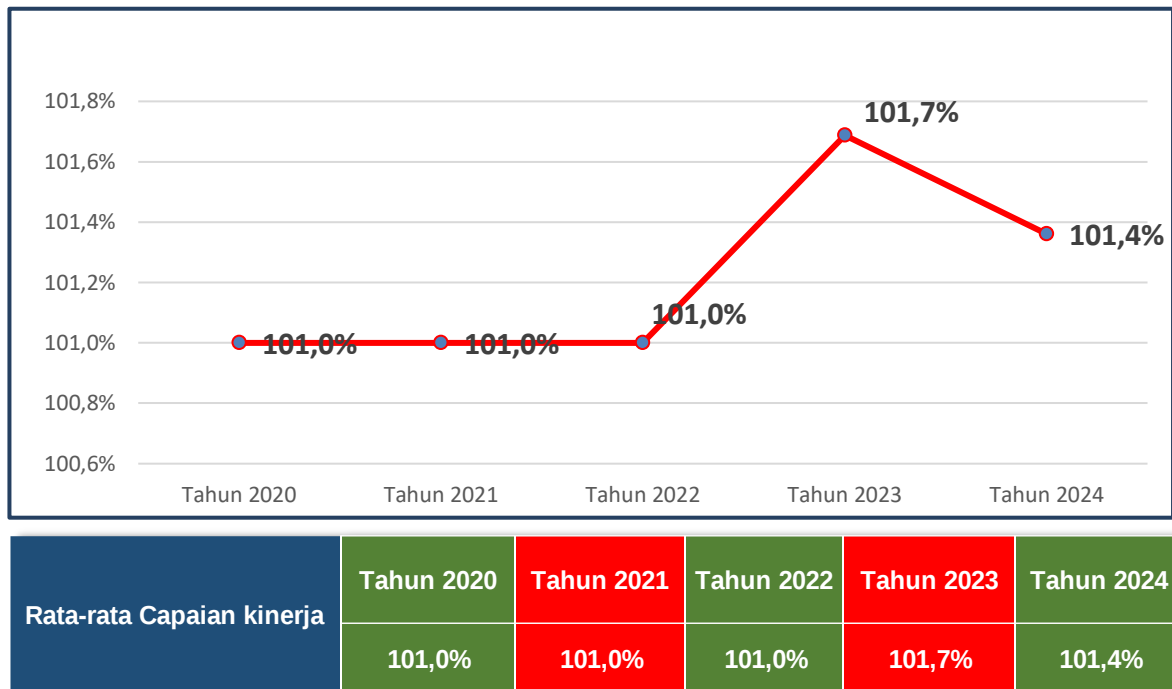
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Riau tahun 2024 jika dibandingkan tahun 2023 mengalami penurunan 0,3%. Berdasarkan data Tabel 28 di bawah, rata-sata capaian kinerja sasaran strategis 1 dan sasasaran strategis 2 pada tahun 2024 sebesar **101,4%** sedangkan tahun 2023 sebesar **101,7%**. Kondisi ini disebabkan karena terdapat beberapa indikator kinerja yang targetnya tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, seperti indikator “Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu” dan indikator “Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu” targetnya meningkat 1%, namun realisasi tetap sama sebesar 100%, sehingga capaiannya lebih rendah dari tahun sebelumnya. Selain itu penurunan tersebut juga disebabkan karena realisasi salah satu indikator kinerja yaitu “Persentase perkara yang tidak mengajukan kasasi”, pada tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun 2023, namun capaian kinerja indikator tersebut tetap melebihi target.

Tabel 28. Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1 Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	96,0%	100,0%	104,2%	97,0%	100,0%	103,1%
		2 Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	96,0%	100,0%	104,2%	97,0%	100,0%	103,1%
		3 Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		4 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40,0%	42,5%	106,3%	40,0%	41,8%	104,5%
		5 Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	96,0%	98,2%	102,3%	97,0%	99,9%	103,0%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	103,4%			102,7%		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		2 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		3 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	100,0%			100,0%		
Rata - Rata Capaian KinerjaSasaran Strategis 1 dan 2			101,7%			101,4%		

Peningkatan perkara yang mengajukan kasasi terjadi pada akhir tahun 2024 bulan Desember, dan kondisi ini tidak dapat diprediksi karena berapapun banyak jumlah kasasi dalam perkara yang dimohonkan para pihak berperkara tidak bisa dibatasi oleh Pengadilan, sebab, Pengadilan hanya menerima dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Dalam UU kekuasaan kehakiman, pengadilan juga tidak boleh menolak perkara. Perkara yang masuk ke pengadilan akan diterima dan ditangani.

Grafik 9. Capaian Kinerja Tahun 2020 s.d Tahun 2024



Grafik 9 diatas menggambarkan bahwa walaupun capaian kinerja tahun 2024 menurun dibandingkan tahun 2023, namun secara umum capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2020 s.d 2024, telah melebihi 100% dan capaian kinerja tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.



REALISASI KINERJA DIBANDINGKAN TARGET JANGKA MENENGAH

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau tahun 2024 sebesar **101,4%** telah mendekati capaian kinerja yang diukur menggunakan target jangka menengah yaitu sebesar **102,0%**. Target jangka menengah ditetapkan pada Renstra Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2020-2024. Rincian capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan capaian target jangka menengah dapat dilihat pada Tabel 29.

Tabel 29. Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Target Jangka Menengah		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1 Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	97,0%	100,0%	103,1%	93,0%	100,0%	107,5%
		2 Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	97,0%	100,0%	103,1%	93,0%	100,0%	107,5%
		3 Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100,0%	100,0%	100,0%	97,0%	100,0%	103,1%
		4 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40,0%	41,8%	104,5%	44,0%	41,8%	95,0%
		5 Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97,0%	99,9%	103,0%	93,0%	99,9%	107,4%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1			102,7%			104,1%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		2 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		3 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2			100,0%			100,0%
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2			101,4%			102,0%		

Kinerja Pengadilan Tinggi Riau jika diukur menggunakan target jangka menengah, capaiannya lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja tahun 2024, hal ini disebabkan karena secara umum realisasi kinerja tahun 2024 telah mencapai 100%, dan target kinerja tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan target kinerja jangka menengah. Pada tahun 2024, dari 8 (delapan) indikator kinerja utama, terdapat 6 (enam) indikator kinerja telah mencapai realisasi 100%, dan terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang targetnya lebih tinggi dibandingkan target jangka menengah dan 3 (tiga) indikator kinerja yang targetnya sama 100%, dan hanya 1 (satu) indikator yang targetnya dibawah target jangka menengah .

Peningkatan target menjadi trend dalam penyusunan Rencana Strategis 2020-2024 yaitu adanya tantangan untuk menargetkan kinerja lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga target kinerja pada tahun 2024 lebih tinggi dari target jangka menengah dan paling tinggi dibandingkan target kinerja periode Renstra tahun 2020-2024.

REALISASI KINERJA DIBANDINGKAN LEVEL NASIONAL

Tabel 30. Capaian kerja Pengadilan Tinggi Riau dibandingkan dengan rata-rata capaian nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024			Rata-rata Capaian Nasional 34 Pengadilan Tinggi di lingkungan Badilum Tahun 2024			Rata-rata Capaian Nasional 15 Pengadilan Tinggi di lingkungan Badilum dengan kategori 301-1000 perkara Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1 Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	97,0%	100,0%	103,1%	97,4%	99,7%	102,6%	98,0%	99,5%	101,6%
		2 Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	97,0%	100,0%	103,1%	97,5%	99,7%	102,4%	97,9%	99,3%	101,5%
		3 Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100,0%	100,0%	100,0%	97,7%	99,4%	102,0%	98,2%	100,0%	101,9%
		4 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40,0%	41,8%	104,5%	41,3%	45,5%	112,7%	38,9%	42,6%	110,1%
		5 Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97,0%	99,9%	103,0%	92,7%	97,4%	105,2%	91,5%	97,9%	107,1%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	102,7%			104,9%			104,4%		
	2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100,0%	100,0%	100,0%	98,6%	99,9%	101,5%	98,5%	100,0%
2 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu			100,0%	100,0%	100,0%	98,6%	99,9%	101,4%	98,5%	100,0%	101,6%
3 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu			100,0%	100,0%	100,0%	98,6%	99,6%	101,1%	98,5%	100,0%	101,6%
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2			100,0%			101,3%			101,6%		
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2			101,4%			103,1%			103,0%		

Berdasarkan data pada Tabel 30, capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024 adalah sebesar **101,4%**, dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja nasional pada 34 (tiga puluh empat) Pengadilan Tinggi di lingkungan Badan Peradilan Umum adalah sebesar **103,1%**, dan dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja nasional pada 15 (lima belas) Pengadilan Tinggi di lingkungan Badan Peradilan Umum dengan kategori jumlah perkara 301 s.d 1000 perkara adalah sebesar **103,0%**. Perbedaan yang cukup signifikan pada capaian kinerja ini disebabkan oleh :

1. Target kinerja Pengadilan Tinggi Riau tahun 2024, dari 8 (delapan) indikator kinerja terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang targetnya lebih tinggi daripada rata-rata target nasional. Indikator tersebut antara lain :
 - a. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu, target 100%, sedangkan rata-rata target nasional 97,7% dan 98,2%.
 - b. Index Persepsi *Stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan, target 97%, sedangkan rata-rata target nasional 92,5% dan 91,5%.

- c. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu, target 100%, sedangkan rata-rata target nasional 98,3% dan 96,5%.
 - d. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu, target 100%, sedangkan rata-rata target nasional 98,3% dan 96,5%.
 - e. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu, target 100%, sedangkan rata-rata target nasional 98,3% dan 96,5%.
2. Realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Riau, dari 8 (delapan) indikator kinerja terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang realisasinya lebih tinggi daripada rata-rata realisasi nasional dan telah mencapai realisasi maksimal sebesar 100%, yaitu :
- a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
 - b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
 - c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu
 - d. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu,
 - e. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu,
 - f. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu,

Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum target kinerja dan realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, baik pada 34 (tiga puluh empat) Pengadilan Tinggi di lingkungan Badan Peradilan Umum maupun pada 15 (lima belas) Pengadilan Tinggi di lingkungan Badan Peradilan Umum dengan kategori jumlah perkara 301 s.d 1.000 perkara.

Tabel 31. Capaian Kinerja Nasional 34 Pengadilan Tinggi di lingkungan Badan Peradilan Umum

No	SATUAN KERJA	Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel															Sasaran Strategis II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara											Rata-rata Capaian Kinerja	KATEGORI PENGADILAN (JUMLAH PERKARA)				
		Indikator Kinerja															Indikator Kinerja																
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu			Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu			Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu			Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			Capaian Kinerja Sasaran I	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu			Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu			Persentase Salinan Putusan Perkara Tipikor yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu			Capaian Kinerja Sasaran II						
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian										
1	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	98	97,62	99,61	98	100	102,04	98	100	102,04	40,00	52,73	131,83	90,00	97,87	108,74	108,9	99	100	100	101,01	99	100	100	101,01	99	100	100	101,01	101,0	104,9	301-1000 Perkara	
2	Pengadilan Tinggi Mataram	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	40,00	40,88	102,20	95,00	96,95	102,05	100,9	100	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,0	100,4	301-1000 Perkara
3	Pengadilan Tinggi Denpasar	95	99,8	105,05	95	100	105,26	95	100	105,26	40,00	40,40	101,00	90,00	97,30	108,11	104,9	100	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,0	102,5	301-1000 Perkara
4	Pengadilan Tinggi Riau	97	100	103,1	97	100	103,1	100	100	100,00	40,00	41,8	104,5	97,00	99,9	103,0	102,7	100	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,0	101,4	301-1000 Perkara
5	Pengadilan Tinggi Jambi	96	99,4	103,54	98	100	102,04	96	100	104,17	35,00	38,38	109,66	93,00	99,30	106,77	105,2	100	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,0	102,6	301-1000 Perkara
6	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	40,00	43,88	109,70	90,00	99,97	111,08	104,2	100	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,0	102,1	301-1000 Perkara
7	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	100	99,25	99,25	100	100	100,00	100	100	100,00	40,00	45,33	113,33	95,00	93,84	98,78	102,3	100	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,0	101,1	< 300 Perkara
8	Pengadilan Tinggi Ambon	95	100	105,26	95	100	105,26	95	100	105,26	35,00	35,58	101,66	95,00	99,13	104,35	104,4	100	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,0	102,2	< 300 Perkara
9	Pengadilan Tinggi Banten	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	45,00	49,00	108,89	90,50	95,24	105,24	102,8	100	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,0	101,4	301-1000 Perkara
10	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	40,00	47,89	119,73	90,00	95,63	106,26	105,2	100	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,0	102,6	< 300 Perkara
11	Pengadilan Tinggi Bengkulu	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	26,00	27,90	107,31	96,00	96,98	101,02	101,7	100	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,0	100,8	< 300 Perkara
12	Pengadilan Tinggi Bandung	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	33,75	33,91	100,47	90,00	99,50	110,56	102,2	100	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,0	101,1	> 1000 Perkara
13	Pengadilan Tinggi Makassar	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	45,00	49,35	109,67	90,00	94,19	104,66	102,9	95	99,25	104,47	95	100	105,26	95	86,15	90,68	100,1	101,5	> 1000 Perkara				
14	Pengadilan Tinggi Surabaya	96	99,27	103,41	96	99,9	104,06	96	100	104,17	56,00	59,77	106,73	95,00	98,26	103,43	104,4	98	100	102,04	98	99,9	101,94	98	100	102,04	102,0	103,2	> 1000 Perkara				
15	Pengadilan Tinggi Manado	95	100	105,26	95	100	105,26	95	100	105,26	35,00	39,18	111,94	90,00	94,89	105,43	106,6	95	100	105,26	95	100	105,26	95	100	105,26	105,3	105,9	301-1000 Perkara				
16	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	95	100	105,26	95	100	105,26	95	100	105,26	50,00	55,27	110,54	95,00	99,34	104,57	106,2	95	100	105,26	95	100	105,26	95	100	105,26	105,3	105,7	> 1000 Perkara				
17	Pengadilan Tinggi Papua Barat	100	100	100,00	100	100	100,00	100	80,95	80,95	50,00	55,08	110,16	92,00	96,69	105,10	99,2	100	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,0	99,6	< 300 Perkara			
18	Pengadilan Tinggi Medan	88	100	113,64	94	100	106,38	97	100	103,09	40,00	73,00	182,50	96,00	96,25	100,26	121,2	96	100	104,17	98	100	102,04	96	100	104,17	103,5	112,3	> 1000 Perkara				
19	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	25,00	32,80	131,20	94,00	99,50	105,85	107,4	100	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,0	103,7	< 300 Perkara			
20	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	93	97	104,30	90	90	100,00	93	100	107,53	45,00	48,00	106,67	92,00	92,00	100,00	103,7	100	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,0	101,8	301-1000 Perkara			
21	Pengadilan Tinggi Jayapura	96	100	104,17	96	100	104,17	96	100	104,17	40,00	50,41	126,03	92,00	96,74	105,15	108,7	95	100,00	105,26	96,00	100,00	104,17	95,00	100,00	105,26	104,9	106,8	< 300 Perkara				
22	Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau	85	100	117,65	85	100	117,65	85	100	117,65	25,00	50,12	200,48	85,00	92,72	109,08	132,5	100	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,0	116,3	< 300 Perkara			
23	Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	60,00	51,58	85,97	96,00	97,54	101,60	97,5	100	98,64	98,64	100	100	100,00	100	N/A	N/A	99,3	98,4	< 300 Perkara				
24	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	34,00	38,43	113,03	85,00	98,98	116,45	105,9	100	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,0	102,9	301-1000 Perkara			
25	Pengadilan Tinggi Pontianak	96	98,34	102,44	96	100	104,17	96	100	104,17	34,00	36,17	106,38	95,00	99,36	104,59	104,3	100	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,0	102,2	301-1000 Perkara			
26	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	37,50	47,00	125,33	94,00	103,05	109,63	107,0	100	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,0	103,5	301-1000 Perkara			
27	Pengadilan Tinggi Palembang	100	99,26	99,26	100	100	100,00	100	100	100,00	53,00	48,01	90,58	93,00	98,61	106,03	99,2	100	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,0	99,6	301-1000 Perkara			
28	Pengadilan Tinggi Kupang	100	99,52	99,52	100	100	100,00	100	100	100,00	25,00	26,96	107,84	95,00	99,63	104,87	102,4	95	100	105,26	95	100	105,26	95	100	105,26	105,3	103,9	301-1000 Perkara				
29	Pengadilan Tinggi Jakarta	96	99,81	103,97	96	99,45	103,59	96	100	104,17	78,00	84,57	108,42	90,00	95,00	105,56	105,1	95	99,72	104,97	93	97,25	104,57	96	100	104,17	104,6	104,9	> 1000 Perkara				
30	Pengadilan Tinggi Kendari	90	100	111,11	90	100	111,11	90	100	111,11	30,00	40,00	133,33	90,00	96,82	107,58	114,8	90	100	111,11	90	100	111,11	90	100	111,11	111,1	113,0	< 300 Perkara				
31	Pengadilan Tinggi Padang	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	57,00	59,00	103,51	95,00	94,55	99,53	100,6	100	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,0	100,3	301-1000 Perkara			
32	Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat	99	100	101,01	99	100	101,01	98	100	102,04	52,00	17,90	34,42	90,00	97,84	108,71	89,4	98	100	102,04	98	100	102,04	98	100	102,04	102,0	95,7	< 300 Perkara				
33	Pengadilan Tinggi Gorontalo	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	40,00	45,78	114,45	100,00	98,46	98,46	102,6	100	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,0	101,3	< 300 Perkara			
34	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	39,33	40,20	102,21	96,00	98,99	103,11	101,1	100	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100,0	100,5	< 300 Perkara			
Rata-rata		97,35	99,68	102,55	97,50	99,69	102,36	97,68	99,44	101,95	41,34	45,48	112,69	92,69	97,38	105,16	104,95	98,56	99,93	101,46	98,59	99,92	101,41	98,59	99,58	101,10	101,30	103,12					

Tabel 32. Capaian Kinerja Nasional 15 Pengadilan Tinggi di lingkungan Badan Peradilan Umum Kategori Pengadilan Jumlah Perkara 301 s.d 1.000 Perkara

No	Satuan Kerja	Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel														Sasaran Strategis II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara												Rata-rata Capaian Kinerja	KATEGORI PENGADILAN (JUMLAH PERKARA)	
		Indikator Kinerja														Indikator Kinerja														
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu			Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu			Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu			Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			Capaian Kinerja Sasaran I	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu			Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu			Persentase Salinan Putusan Perkara Tipikor yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu			Capaian Kinerja Sasaran II			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian							
1	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	98,0	97,6	99,6	98,0	100,0	102,0	98,0	100,0	102,0	40,0	52,7	131,8	90,0	97,9	108,7	108,9	99,0	100,0	101,0	99,0	100,0	101,0	99,0	100,0	101,0	101,0	104,9	301-1000 Perkara	
2	Pengadilan Tinggi Mataram	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	40,0	40,9	102,2	95,0	97,0	102,1	100,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	301-1000 Perkara
3	Pengadilan Tinggi Denpasar	95,0	100,0	105,3	95,0	100,0	105,3	95,0	100,0	105,3	35,0	38,5	110,0	93,0	96,5	103,8	105,9	94,0	100,0	106,4	94,0	100,0	106,4	94,0	100,0	106,4	106,4	106,1	301-1000 Perkara	
4	Pengadilan Tinggi Riau	97,0	100,0	103,1	97,0	100,0	103,1	100,0	100,0	100,0	40,0	41,8	104,5	97,0	99,9	103,0	102,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	101,4	301-1000 Perkara
5	Pengadilan Tinggi Jambi	96,0	99,4	103,5	98,0	100,0	102,0	96,0	100,0	104,2	35,0	38,4	109,7	93,0	99,3	106,8	105,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	102,6	301-1000 Perkara
6	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	40,0	43,9	109,7	90,0	100,0	111,1	104,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	102,1	301-1000 Perkara
7	Pengadilan Tinggi Banten	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	45,0	49,0	108,9	90,5	95,2	105,2	102,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	101,4	301-1000 Perkara
8	Pengadilan Tinggi Manado	95,0	100,0	105,3	95,0	100,0	105,3	95,0	100,0	105,3	35,0	39,8	113,7	90,0	94,9	105,4	107,0	95,0	100,0	105,3	95,0	100,0	105,3	95,0	100,0	105,3	105,3	106,1	301-1000 Perkara	
9	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	93,0	97,0	104,3	90,0	90,0	100,0	93,0	100,0	107,5	45,0	48,0	106,7	92,0	92,0	100,0	103,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	101,8	301-1000 Perkara
10	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	34,0	38,4	113,0	85,0	99,0	116,4	105,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	102,9	301-1000 Perkara
11	Pengadilan Tinggi Pontianak	96,0	100,0	104,2	96,0	100,0	104,2	96,0	100,0	104,2	34,0	36,2	106,4	95,0	99,4	104,6	104,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	102,3	301-1000 Perkara
12	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	37,5	47,0	125,3	94,0	103,1	109,6	107,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	103,5	301-1000 Perkara
13	Pengadilan Tinggi Palembang	100,0	99,2	99,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	53,0	41,0	77,4	93,0	98,6	106,0	96,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,3	301-1000 Perkara
14	Pengadilan Tinggi Kupang	100,0	99,5	99,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	25,0	27,0	107,8	90,0	99,6	110,7	103,6	90,0	100,0	111,1	90,0	100,0	111,1	90,0	100,0	111,1	111,1	107,4	301-1000 Perkara	
15	Pengadilan Tinggi Padang	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	45,0	56,0	124,4	85,0	95,6	112,4	107,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	103,7	301-1000 Perkara
Rata-rata		98,0	99,5	101,6	97,9	99,3	101,5	98,2	100,0	101,9	38,9	42,6	110,1	91,5	97,9	107,1	104,4	98,5	100,0	101,6	98,5	100,0	101,6	98,5	100,0	101,6	101,6	103,0		

ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

1. Efisiensi Anggaran

Untuk mengukur efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja, perlu dibandingkan antara capaian kinerja sasaran strategis pada indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dengan realisasi belanja yang mendukung indikator tersebut. Perbandingan capaian kinerja kinerja dengan realisasi belanja pada tahun 2024, dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 33. Analisis Efisiensi Anggaran

Uraian		Belanja				Capaian Kinerja		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Capaian
1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1 Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	DIPA (01) BUA	26.848.880.000	26.842.869.097	99,98%	97%	100%	103,1%
	2 Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu					97%	100%	103,1%
	3 Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu					100%	100%	100,0%
	4 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi					40%	41,8%	104,5%
	5 Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan					97%	99,9%	103,0%
Rata - Rata		99,98%				102,7%		
EFISIEN								
Karena Realisasi Belanja < Capaian Kinerja (99,98% < 102,7%)								
2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Biaya Proses	32.400.000	32.300.000	99,69%	100%	100%	100,0%
	2 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	DIPA (03) Badilum	235.514.000	235.483.834	99,99%	100%	100%	100,0%
	3 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu					100%	100%	100,0%
Rata - Rata		99,95%				100,0%		
EFISIEN								
Karena Realisasi Belanja < Capaian Kinerja (99,95% < 100%)								

Berdasarkan data pada Tabel 33, realisasi belanja yang mendukung kinerja untuk mencapai target masing-masing indikator sasaran strategis lebih kecil dari capaian kinerja sasaran strategis, sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel", dengan 5 (lima) indikator kinerja utama memperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 102,7%. Untuk mencapai target kinerja sasaran ini didukung dengan dengan belanja anggaran DIPA (01) BUA dengan realisasi belanja sebesar 99,98%. Nilai realisasi belanja lebih kecil dibandingkan dengan nilai capaian kinerja Sasaran Strategis 1. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis 1 telah Efisien..
2. Sasaran Strategis 2 "Peningkatan Efektivitas Pengeolaan Penyelesaian Perkara", dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama memperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 100%. Capaian kinerja ini didukung dengan belanja Biaya Proses untuk indikator "Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim tepat waktu", dan didukung belanja anggaran DIPA (03) Badilum untuk indikator "Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim tepat waktu ke Pengadilan Pengaju pada perkara Pidana dan Pidana Khusus". Rata-rata realisasi belanja Biaya Proses dan DIPA (03) Badilum sebesar 99,95%. Nilai realisasi belanja lebih kecil dibandingkan dengan nilai capaian kinerja Sasaran Strategis 2. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis 2 telah Efisien..

Secara umum dapat disimpulkan bahwa bahwa capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2024 didukung dengan anggaran yang penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel, dan efisien karena adanya kesesuaian antara realisasi belanja dengan capaian kinerja.



2. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Efisiensi SDM (Sumber Daya Manusia) dapat diartikan sebagai cara organisasi membangun kinerja dengan menggunakan sumber daya secara efektif.

Berdasarkan buku “Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan” yang diberlakukan tahun 2007 melalui SK Ketua Mahkamah Agung No. 143/KMA/SK/VIII/2007, dijelaskan bahwa standar Formasi Pegawai Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum maksimal berjumlah 131 (seratus tiga puluh satu) orang. Jumlah pegawai Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2024 berjumlah 94 (sembilan puluh empat) orang, dengan rincian formasi pegawai dan formasi standar adalah sebagai berikut:

Tabel 34. Formasi Pegawai Pengadilan Tingkat Banding

Formasi Standar Pegawai Pengadilan Tingkat Banding		Formasi Pegawai Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024	
Jabatan	Jumlah	Jabatan	Jumlah
Ketua	1	Ketua	1
Wakil	1	Wakil	1
Hakim	23	Hakim Tinggi	21
Panitera/Sekretaris	1	Hakim Adhoc	3
Wakil Panitera	1	Panitera	1
Wakil Sekretaris	1	Sekretaris	1
Panmud	3	Kepala Bagian	2
Kasubbag	3	Panmud	4
Panitera Pengganti	32	Kepala Subbagian	4
Staf Kepaniteraan	15	Panitera Pengganti	22
Staf Kesekretariatan	14	Pejabat Fungsional	9
Staf lain & PPNP	36	Pelaksana	18
		PPNP	7
Total	131	Total	94

Seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Riau adalah Sumber Daya Manusia yang mendukung tercapainya kinerja sesuai target kinerja yang telah ditetapkan pada seluruh indikator sasaran strategis. Dalam mendukung capaian kinerja, persentas jumlah pegawai Pengadilan Tinggi Riau dibandingkan dengan standar jumlah pegawai dijelaskan pada Tabel 34.

Tabel 35. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Uraian		Sumber Daya Manusia (SDM)			Capaian Kinerja		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Tahun 2024	Perbandingan (%)	Target	Realisasi	Capaian
1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1 Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	131	94	72%	97%	100%	103,1%
	2 Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu				97%	100%	103,1%
	3 Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu				100%	100%	100,0%
	4 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				40%	41,8%	104,5%
	5 Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan				97%	99,9%	103,0%
		Ketersediaan SDM 72%			Rata-rata capaian kinerja 102,7%		
Kesimpulan : EFISIEN karena Ketersediaan SDM < Capaian kinerja							
2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	131	94	72%	100%	100%	100,0%
	2 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu				100%	100%	100,0%
	3 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu				100%	100%	100,0%
Rata - Rata Capaian Kinerja		Ketersediaan SDM 72%			Rata-rata capaian kinerja 100,0%		
Kesimpulan : EFISIEN karena Ketersediaan SDM < Capaian kinerja							

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai Pengadilan Tinggi Riau yang tersedia untuk mendukung kinerja Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2024 hanya sebesar 72% dari standar jumlah maksimum pegawai, namun dengan jumlah sumber daya manusia yang ada Pengadilan Tinggi Riau berhasil memperoleh capaian kinerja sasaran strategis masing-masing sebesar 102,7% dan 100%.

Kondisi ini menunjukkan adanya efisiensi sumber daya manusia di Pengadilan Tinggi Riau, karena walaupun jumlah sumber daya yang belum maksimal dan memenuhi standar, namun Pengadilan Tinggi Riau telah membangun kinerja dan menggunakan sumber daya secara efektif sehingga mampu mencapai kinerja yang maksimal.

Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Riau yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka pada Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Riau memperoleh alokasi anggaran dari APBN melalui 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 yaitu DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum. Selain anggaran dari APBN, untuk kinerja pengelolaan administrasi perkara perdata didukung dengan Biaya Proses Perkara Perdata.

Anggaran APBN maupun Biaya Proses digunakan untuk mendukung kegiatan guna tercapainya masing-masing indikator kinerja pada sasaran strategis yang telah ditetapkan, dengan rincian alokasi dan realisasi anggaran sebagai berikut :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi (BUA)

Pagu Anggaran DIPA (01) BUA untuk Pengadilan Tinggi Riau pada Tahun Anggaran. 2024 sebesar Rp. 26.848.880.000,00 (Dua puluh dua enam miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Anggaran tersebut terdiri dari

- a. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 22.889.966.000,00 (Dua puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)
- b. Belanja Barang, sebesar Rp. 3.958.914.000,00 (Tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah)

Anggaran ini digunakan untuk membiayai Program Dukungan Manajemen, Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, untuk mencapai Sasaran Strategis 1 yaitu “Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel”, yang diukur melalui 8 (delapan) indikator kinerja utama. Pada tahun 2024, realisasi anggaran DIPA (01) sebesar 99,98% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 36. Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2024

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
1.	Belanja Pegawai	Rp 22.889.966.000	Rp 22.883.974.300	99,97%	Rp 5.991.700	0,03%
2.	Belanja Barang	Rp 3.958.914.000	Rp 3.958.894.797	100,00%	Rp 19.203	0%
Jumlah		Rp 26.848.880,00	Rp 26.842.869.097	99,98%	Rp 6.010.903	0,02%

Rincian anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang Pegawai pada DIPA (01) tersebut dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 37. Rincian Belanja Pegawai dan Belanja Barang Tahun 2024

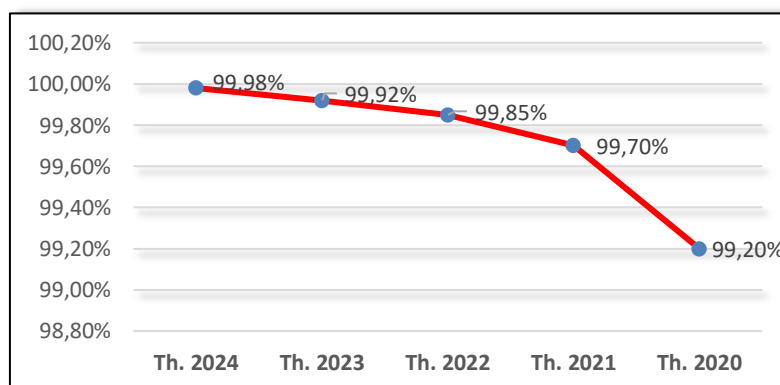
No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
			Rp.	%
BELANJA PEGAWAI				
1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rp. 22.889.966.000	Rp. 22.883.974.300	99,97%
BELANJA BARANG				
1	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	Rp. 787.657.000	Rp. 787.652.676	100,00%
2	Langganan Daya dan Jasa	Rp. 1.114.788.000	Rp. 1.114.785.623	100,00%
3	Pemeliharaan Kantor	Rp. 1.379.494.000	Rp. 1.379.484.311	100,00%
4	Pembayaran terkait Operasional Kantor	Rp. 127.592.000	Rp. 127.592.000	100,00%
5	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan	Rp. 7.662.000	Rp. 7.662.000	100,00%
6	Rapat Koordinasi Internal	Rp. 17.277.000	Rp. 17.276.050	99,99%
7	Koordinasi ke Pusat dan Pembinaan Tk. Pertama	Rp. 277.003.000	Rp. 277.001.137	100,00%
8	Seleksi Hakim Adhoc	Rp. 3.091.000	Rp. 3.091.000	100,00%
9	Hak dan Fasilitas Hakim dan Hakim Adhoc	Rp. 244.350.000	Rp. 244.350.000	100,00%
Jumlah		Rp. 26.848.880.000	Rp. 26.842.869.097	99,98%

Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, realisasi anggaran DIPA (01) Tahun 2024 mengalami peningkatan. Gambaran realisasi anggaran DIPA (01) dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dijelaskan pada Tabel 38 dan Grafik 10 berikut ini.

Tabel 38. Realisasi DIPA 01 Tahun 2020 s.d 2024

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
1.	2024	Rp. 26.848.880,000	Rp. 26.842.869.097	99,98%	Rp. 6.010.903	0,02%
2.	2023	Rp. 25.968.301.000	Rp. 25.966.518.908	99,92%	Rp. 19.782.092	0,08%
3.	2022	Rp. 24.512.067.000	Rp. 24.476.206.678	99,85%	Rp. 35.8690.332	0,15%
4.	2021	Rp. 24.360.296.000	Rp. 24.278.241.068	99,7%	Rp. 82.054.932	0,3%
5.	2020	Rp. 22.261.062.000	Rp. 22.076.214.241	99,2%	Rp. 184.847.759	0,8%

Grafik 10. Realisasi DIPA 01 Tahun 2020 s.d 2024



2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum (Badilum)

Pagu Anggaran DIPA (03) Badilum untuk Pengadilan Tinggi Riau pada Tahun Anggaran. 2024 sebesar Rp. 235.514.000 (Dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat belas ribu rupiah). Anggaran ini merupakan belanja barang yang digunakan untuk membiayai Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, untuk mencapai Sasaran Strategis 2 yaitu: “Meningkatnya efektifitas penyelesaian perkara”, yang diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja utama. Pada Tahun 2024 realisasi anggaran DIPA (03) sebesar 99,99% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 39. Realisasi Anggaran DIPA (03) Tahun 2024

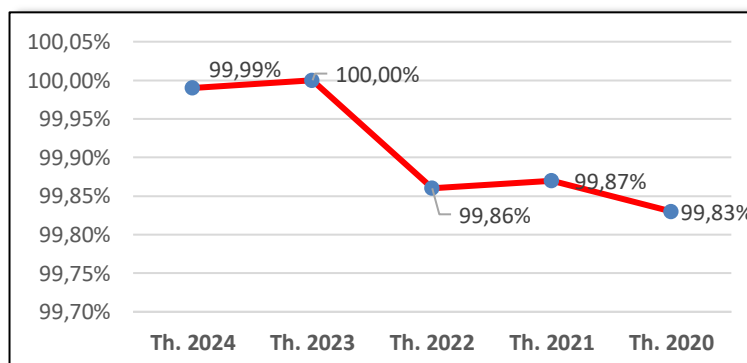
No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
			Rp.	%
1	Pembinaan & Pemeriksaan Teknis dan Administrasi Tk. Banding	Rp. 95.000.000	Rp. 94.973.000	99,97%
2	Pengiriman Surat Penahanan Pidana	Rp. 17.227.000	Rp. 17.226.282	100,00%
3	Pencatatan Register Bandin Pidana	Rp. 65.472.000	Rp. 65.471.182	100,00%
4	Minutasi Perkara Pidana	Rp. 25.224.000	Rp. 25.223.100	100,00%
5	Pengiriman Salinan Putusan Pidana	Rp. 19.999.000	Rp. 7.662.000	100,00%
6	Pengiriman Surat Penahanan Tipikor	Rp. 63.000	Rp. 17.276.050	99,99%
7	Pencatatan Register Banding Tipikor	Rp. 8.028.000	Rp. 8.027.600	100,00%
8	Minutasi Perkara Tipikor	Rp. 4.457.000	Rp. 4.456.670	99,99%
9	Pengiriman Salinan Putusan Tipikor	Rp. 44.000	Rp. 44.000	100,00%
Jumlah		Rp. 235.514.000	Rp. 235.483.834	99,99%

Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, realisasi anggaran DIPA (03) Tahun 2024 mengalami peningkatan. Gambaran realisasi anggaran DIPA (03) dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dijelaskan pada Tabel 40 dan Grafik 11 berikut ini.

Tabel 40. Realisasi DIPA (03) Tahun 2020 s.d 2024

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
1.	2024	Rp. 235.514.000	Rp. 235.483.834	99,99%	Rp. 30.166	0,01%
2.	2023	Rp. 235.514.000	Rp. 235.503.651	100%	Rp. 10.349	0%
3.	2022	Rp. 428.790.000	Rp. 428,180,094	99,86%	Rp. 609.906	0,14%
4.	2021	Rp. 433.260.000	Rp. 432.712.595	99,87%	Rp. 547.405	0,13%
5.	2020	Rp. 393.740.000	Rp. 393.056.688	99,83%	Rp. 683.312	0,17%

Grafik 11. Realisasi DIPA (03) Tahun 2020 s.d 2024



3. Biaya Proses

Biaya proses perkara perdata adalah biaya yang dibayarkan untuk menyelesaikan perkara perdata di pengadilan. Biaya ini dibebankan kepada pihak-pihak yang berperkara. Pengiriman salinan putusan perkara Perdata menggunakan biaya proses perdata, dengan demikian biaya proses ini mendukung indikator kinerja “Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu”. Adapun penerimaan biaya proses perdata pada tahun 2024 dan realisasinya dirinci pada Tabel 41.

Tabel 41. Penerimaan dan Realisasi Biaya Proses Perdata Tahun 2024

No	Periode	Penerimaan	Pengeluaran	Realisasi
1	Januari	3.900.000,00	3.560.000,00	91,28%
2	Februari	2.850.000,00	2.990.000,00	104,91%
3	Maret	1.500.000,00	1.680.000,00	112,00%
4	April	3.450.000,00	3.190.000,00	92,46%
5	Mei	2.100.000,00	2.120.000,00	100,95%
6	Juni	2.550.000,00	2.610.000,00	102,35%
7	Juli	4.200.000,00	4.040.000,00	96,19%
8	Agustus	2.550.000,00	2.750.000,00	107,84%
9	September	2.850.000,00	2.790.000,00	97,89%
10	Oktober	1.800.000,00	1.920.000,00	106,67%
11	November	2.400.000,00	2.300.000,00	95,83%
12	Desember	2.250.000,00	2.350.000,00	104,44%
Total		32.400.000,00	32.300.000,00	99,69%





Bab IV Penutup

- Kesimpulan
- Rekomendasi



Email
admin@pt-riau.go.id



Website
pt-riau.go.id

Kesimpulan

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024 adalah bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja selama kurun waktu tahun 2024, dan periode terakhir Renstra 2020-2024. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Tinggi Riau dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yang menginformasikan tingkat capaian sasaran kinerja dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra).



Secara umum capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau pada Tahun 2024 telah sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan, yaitu berupa target-target yang akan dicapai beserta anggarannya. Penggunaan anggaran yang mendukung pelaksanaan kinerja untuk mencapai target-target tersebut dalam penggunaannya juga telah efisien, dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel, karena adanya kesesuaian antara realisasi anggaran dengan rata-rata capaian kinerja. Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) juga dikelola dengan efektif, sehingga dengan jumlah SDM yang belum memenuhi standar maksimal namun Pengadilan Tinggi Riau mampu mencapai kinerja yang maksimal.

Dapat disimpulkan bahwa kinerja Tinggi Riau pada tahun 2024 dinyatakan berhasil, dan dibuktikan dengan banyaknya prestasi dan penghargaan yang diperoleh Pengadilan Tinggi Riau dan satua kerja di wilayah hukumnya.

Keberhasilan capaian Pengadilan Tinggi Riau tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, sebagai berikut :

1. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dengan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik dan membangun inovasi pelayanan publik.
2. Kebijakan peningkatan Standar Pelayanan dan SOP Penyelesaian Perkara.
3. Dukungan anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pelayanan publik
4. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pelayanan publik
5. Dukungan sumber daya manusia tenaga teknis maupun non teknis
6. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara periodik dan ditindaklanjuti
7. Hubungan baik dengan *stakeholder* dan pengguna layanan pengadilan.

Rekomendasi

Kinerja Pengadilan Tinggi pada tahun 2024 walapun sudah dinyatakan berhasil, namun tidak luput dari kendala dan permasalahan, sehingga menimbulkan rata-rata capaian kinerja tahun 2024 sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023, yaitu khususnya pada indikator Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Indikator ini belum SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*), dikarenakan tidak *Achievable* akibat masih sangat bergantung pada para pihak di luar satkernya (eksternal). Indikator ini tidak relevan untuk dijadikan alat ukur kinerja Pengadilan Tinggi, karena menargetkan kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah kondisi yang sulit diprediksi. Berapapun banyak jumlah kasasi dalam perkara yang dimohonkan para pihak berperkara tidak bisa dibatasi oleh Pengadilan, sebab, Pengadilan hanya menerima dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya.

Selain kendala diatas, perlu juga diperhatikan bahwa pada Pengadilan Tingkat Banding, selain 8 (delapan) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan Mahkamah Agung melalui SK Sekma No. 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI, maka perlu juga diukur kinerja bagian Kesekretariatan dan kinerja Pengawasan. Karena bagian Kesekretariatan sebagai *supporting unit* pada Pengadilan memiliki kinerja di bidang Keuangan, Kepegawaian, Perencanaan, dan Pengelolaan BMN yang dapat diukur. Selain itu Pengadilan Tinggi juga memiliki fungsi Pengawasan yang didukung dengan anggaran dan kinerjanya dapat diukur.

Sehubungan Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2020-2024 telah selesai, selanjutnya untuk Renstra 5 (lima) tahun berikutnya, diharapkan Mahkamah Agung melakukan reviu terhadap indikator kinerja utama Pengadilan Tinggi, menghilangkan indikator kinerja yang tidak relevan dan menambah indikator kinerja yang mendukung tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tingkat banding termasuk kinerja bagian kesekretariatan dan kinerja pengawasan.



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Struktur Organisasi

Lampiran 2 : Indikator Kinerja Utama

Lampiran 3 : Renstra 2020-2024

Lampiran 4 : Rencana Kinerja Tahun 2024

Lampiran 5 : Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Lampiran 6 : Capaian Kinerja Tahun 2024

Lampiran 7 : Capaian Kinerja Berkala Tahun 2024

Lampiran 8 : Analisis Efisiensi Anggaran

Lampiran 9 : Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Lampiran 10: Checklist Reviu

Lampiran 11: SK Tim Penyusun LKjIP

LAMPIRAN 1

Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI RIAU



LAMPIRAN 2
Indikator Kinerja Utama



PENGADILAN TINGGI RIAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU

NOMOR : W4.U/ 4726 /OT.01.1 /4/2022

Tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI RIAU

KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pengadilan Tinggi Riau dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa sehubungan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Riau berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor 173/SEK/SK/I/2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Riau.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI RIAU.
- PERTAMA** : Melakukan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Riau mengacu pada reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022.
- KEDUA** : Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Riau digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Riau 2020 - 2024.
- KETIGA** : Menetapkan dan memberlakukan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Riau dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 25 April 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU



PANUSUNAN HARAHAP

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI RIAU**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

			Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		Laporan Tahunan
	Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan 100%	Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Index Persepsi <i>Stakeholder</i> yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Index Persepsi Kepuasan Stakeholder Catatan : • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju}} \quad 100\%$ Catatan : • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengawasan, Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju}} \quad 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

		Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Catatan : • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengawasan, Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.		Laporan Tahunan
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju}} \times 100\%$ Catatan : • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengawasan, Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI RIAU

Sasaran Strategis 1 : Indikator

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur persentase penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu mengacu pada SEMA Nomor 2 Tahun 2014, Yakni "Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding Paling lambat dalam waktu tiga 3 (bulan)".
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu
	B= Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, Aplikasi Evakip, Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI RIAU

Sasaran Strategis 1

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur persentase penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu mengacu pada SEMA Nomor 2 Tahun 2014, Yakni "Penyelesaian Perkara pada Tingkat Banding Paling lambat dalam waktu tiga 3 (bulan) "
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu
	B= Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, Aplikasi Evakip, Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI RIAU

Sasaran Strategis 1

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur persentase penyelesaian Perkara Pidana Khusus Tepat Waktu sesuai Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, Yakni "Penyelesaian Perkara Tipikor Tepat Waktu adalah 2 (dua) bulan".
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu
	B= Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, Aplikasi Evakip, Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI RIAU

Sasaran Strategis 1

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Definisi	Mengukur Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi. Secara hukum, semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum kasasi, maka masyarakat pencari keadilan akan semakin puas atas Putusan di Tingkat Banding.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Perkara (Perdata, Pidana, Pidana Khusus) yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
	B= Jumlah Perkara (Perdata, Pidana, Pidana Khusus) yang diselesaikan
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, Aplikasi Evakip, Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera dan Sekretaris
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI RIAU

Sasaran Strategis 1

Kamus KPI	
Nama KPI	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
Definisi	Mengukur Persentase stakeholder (Pengadilan Tk. Pertama, Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Riau) yang puas terhadap layanan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Riau.
Formula Perhitungan	Survey Kepuasan masyarakat dari aplikasi SISUPER Mahkamah Agung RI
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Aplikasi SISUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik) Mahkamah Agung.
Periode Pengambilan Data	Triwulanan.
Metode Pengambilan Data	Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu
	2. # Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu
	3. # Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu
	4. # Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
	5. # Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
	6. # Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
	7. # Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI RIAU

Sasaran Strategis 2

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
Definisi	Mengukur Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pegaju Tepat Waktu mengacu pada SEMA No. 1 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No. 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, dan yakni Selama 3 Hari setelah Putusan Perkara diputus.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
	B=Jumlah Salinan Putusan Perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, Aplikasi Evakip, Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI RIAU

Sasaran Strategis 2

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
Definisi	Mengukur Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pegaju Tepat Waktu mengacu pada SOP Pengadilan Tinggi Riau yakni Selama 3 Hari setelah Putusan Perkara diputus.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
	B=Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, Aplikasi Evakip, Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI RIAU

Sasaran Strategis 2

Kamus KPI	
Nama KPI	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
Definisi	Mengukur Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pegaju Tepat Waktu mengacu pada SOP Pengadilan Tinggi Riau yakni Selama 3 Hari setelah Putusan Perkara diputus.
Formula Perhitungan	$(A/B) \times 100\%$
	A= Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
	B=Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju
Satuan Digunakan	# Persentase
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sumber Data	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, Aplikasi Evakip, Aplikasi SIPP
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulanan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan Pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. # Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

LAMPIRAN 3
Renstra 2020-2024

Rencana Strategis 2020-2024

TUJUAN			SASARAN							STRATEGIS				
NO	URAIAN	TARGET JANGKA	URAIAN	INDIKATOR	TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp.
					2020	2021	2022	2023	2024					
1	Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Pelayanan Pengadilan Tinggi Riau	93%	1 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	1 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	86%	87%	95%	96%	97%	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional	5 layanan	120.000.000.000
		93%		2 Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	88%	90%	95%	96%	97%					
		97%		3 Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	91%	92%	100%	100%	100%					
		44%		4 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	51%	52%	37%	40%	40%					
		93%		5 Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap Layanan Peradilan	87%	88%	95%	96%	97%					
2	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100%	2 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan tingkat banding tepat waktu	5.000 perkara	1.800.000.000
		100%		2 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		100%		3 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					

LAMPIRAN 4
Rencana Kinerja
Tahun 2024

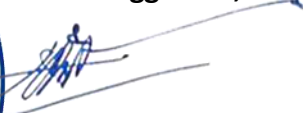


PENGADILAN TINGGI RIAU
RENCANA KINERJA ANGGARAN TAHUN 2024
NO. W4.U/340 /OT.01.1/1/2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	97%
		2	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	97%
		3	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%
		4	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%
		5	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%

Pekanbaru, 4 Januari 2023

Ketua Pengadilan Tinggi Riau,



MOHAMMAD IDROES

LAMPIRAN 5
Perjanjian Kinerja
Tahun 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI RIAU



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 NOMOR : 26 /KPT.W4-U/RA1.10/I/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
NOMOR : 26 /KPT.W4-U/RA1.10/I/2024

PENGADILAN TINGGI RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	97%
		2	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%
		3	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%
		4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%
		5	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%

Kegiatan

Anggaran

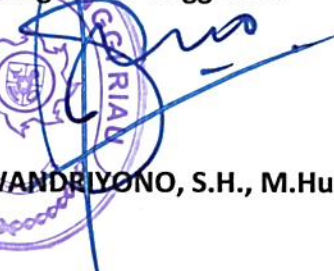
- | | |
|---|--------------------|
| 1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama | Rp. 24.962.017.000 |
| 2. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp. 235.514.000 |

Pekanbaru, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum


H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

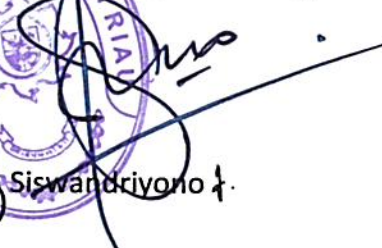
Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Tinggi Riau


Dr. H. SISWANDI YONO, S.H., M.Hum.

LAMPIRAN 6
Capaian Kinerja
Tahun 2024

**PENCAPAIAN KINERJA
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,1%	
		2	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,1%	
		3	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	41,78%	104,5%	
		5	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97%	99,88%	103,0%	
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					102,7%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					100,0%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2					101,4%

Pekanbaru, 3 Januari 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Riau,

Siswandriyono

LAMPIRAN 7
Capaian Kinerja Berkala
Tahun 2024

**PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN I
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,1%	
		2	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,1%	
		3	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	57,70%	144,3%	
		5	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97%	98,70%	101,8%	
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					110,4%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					100,0%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2					105,2%

Pekanbaru, 5 April 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Riau


 Siswandhyono

**PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN II
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,1%	
		2	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,1%	
		3	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	55,51%	138,8%	
		5	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97%	97,26%	100,3%	
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					109,0%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					100,0%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2					104,5%

Pekanbaru, 4 Juli 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Riau,


 Siswan Driyeno

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN III
TAHUN 2024

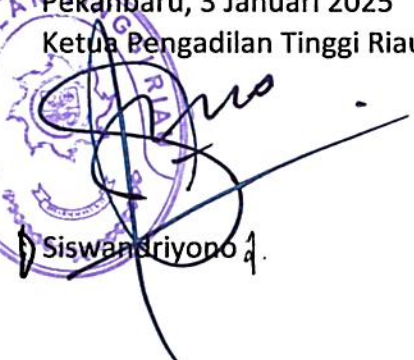
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,1%	
		2	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,1%	
		3	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	54,22%	135,6%	
		5	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97%	97,03%	100,0%	
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					108,4%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					100,0%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2					104,2%

Pekanbaru, 4 Oktober 2024
Ketua Pengadilan Tinggi Riau,


Siswandiyono

**PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,1%	
		2	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	97%	100%	103,1%	
		3	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	49,08%	122,7%	
		5	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97%	99,88%	103,0%	
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					106,4%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					100,0%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2					103,2%

Pekanbaru, 3 Januari 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Riau,

Siswandriyono

LAMPIRAN 8
Analisis Efisiensi Anggaran

ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN

Uraian		Belanja				Capaian Kinerja		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Capaian
1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1 Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	DIPA (01) BUA	26.848.880.000	26.842.869.097	99,98%	97%	100%	103,1%
	2 Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu					97%	100%	103,1%
	3 Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu					100%	100%	100,0%
	4 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi					40%	41,8%	104,5%
	5 Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan					97%	99,9%	103,0%
Rata - Rata		99,98%				102,7%		
EFISIEN								
Karena Realisasi Belanja < Capaian Kinerja (99,98% < 102,7%)								
2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Biaya Proses	32.400.000	32.300.000	99,69%	100%	100%	100,0%
	2 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	DIPA (03) Badilum	235.514.000	235.483.834	99,99%	100%	100%	100,0%
	3 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu					100%	100%	100,0%
Rata - Rata		99,95%				100,0%		
EFISIEN								
Karena Realisasi Belanja < Capaian Kinerja (99,95% < 100%)								

LAMPIRAN 9
Analisis Efisiensi
Sumber Daya Manusia

ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Uraian		Sumber Daya Manusia (SDM)			Capaian Kinerja		
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Tahun 2024	Perbandingan (%)	Target	Realisasi	Capaian
1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1 Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	131	94	72%	97%	100%	103,1%
	2 Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu				97%	100%	103,1%
	3 Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu				100%	100%	100,0%
	4 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				40%	41,8%	104,5%
	5 Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan				97%	99,9%	103,0%
		Ketersediaan SDM 72%			Rata-rata capaian kinerja 102,7%		
Kesimpulan : EFISIEN karena Ketersediaan SDM < Capaian kinerja							
2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	131	94	72%	100%	100%	100,0%
	2 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu				100%	100%	100,0%
	3 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu				100%	100%	100,0%
Rata - Rata Capaian Kinerja		Ketersediaan SDM 72%			Rata-rata capaian kinerja 100,0%		
Kesimpulan : EFISIEN karena Ketersediaan SDM < Capaian kinerja							

LAMPIRAN 10
Checklist reviu

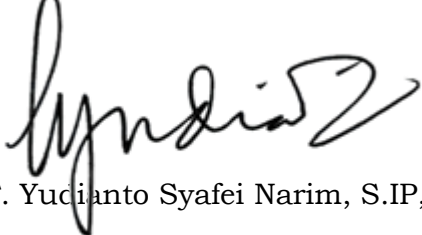
CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan		Check list
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√ √ √ √ √ √
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait 7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	√ √ √ √ √ √ √

III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	
		10. IKU dan IK telah SMART	√

Pekanbaru, 24 Februari 2025

Pereviu I



(T. Yudianto Syafei Narim, S.IP, S.H., M.M.)

Pereviu II



(Roby Hidayat, S.T., M.H.)

LAMPIRAN 11
SK Tim Penyusun LKjIP



KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU

NOMOR: 146/KPT.W4-U/RA1.1/I/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI RIAU**

KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;

b. bahwa Pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN.11.2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah;
9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4506/SEK/OT1.6/XII/2024 Tanggal 24 Desember 2024 Tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 PENGADILAN TINGGI RIAU

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Riau.

KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Februari tahun 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Riau Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 13 Januari 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU,



LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau
Nomor : 146 /KPT.W4-U/RA1.1/I/2025
Tanggal : 13 Januari 2025

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024
PENGADILAN TINGGI RIAU**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1	Pelindung	ASLI GINTING, S.H., M.H.
2	Penanggung Jawab	Dr. SYAHLAN, S.H., M.H.
3	Ketua	ASWIJON, S.H., M.H.
4	Koordinator Penyusun Laporan Kinerja dan Validasi Data	R. SENO SOEHARJONO SANTOSO, S.H., M.H.
	Sekretaris	JUNI DWIANTI, S.Si., M.H.
	Anggota	I.A.N RATNAYANI, S.H., M.H.
		M. JAMALIS, S.H.
		DIYAH FAJAR SARI, S.H, M.H.
		SINTA HERAWATI, S.H.
		DERSIMA HARAHAHAP, S.E., M.H.
		MUHADI, S.E.
		ROMA TUA JUWITA SIHOMBING, S.E.
		FADHLIAMIN, S.SI.
		YUDI OKTAVIANUS, S.E.
		ASYURA TRI RAHMADHANI, A.Md.A.B.
		HENDRA SETIAWAN, S.Ap.
		RISKON AS SHIDDIQIE, S.H.
5	Koordinator Reviu Laporan Kinerja	T. YUDIANTO SYAFEI NARIM, S.IP., S.H., M.M.
	Sekretaris	ROBY HIDAYAT, S.T., M.H.
	Anggota	MANASE SIAHAAN, S.H., M.H.
		BETHARIA OKTAVIANI, S.E.
		MELGISAPUTRA DWI NANDA, S.Kom., M.Kom.
		YUDHI DARMAWAN, S.E.



KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU,

LAMPIRAN II
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau
Nomor : 146 /KPT.W4-U/RA1.1/I/2025
Tanggal : 13 Januari 2025

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024
PENGADILAN TINGGI RIAU**

NO	JABATAN	TUGAS
1	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) tahun 2024 Pengadilan Tinggi Riau
2	Ketua	A. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusun laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; B. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
3	Koordinator Penyusun Laporan Kinerja dan Validasi Data	Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusun laporan kinerja dan memvalidasi keabsahan data kinerja
	Sekretaris	Mengkoordinasikan teknis penyusunan laporan kinerja
	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada Pengadilan Tinggi Riau
4	Koordinator Reviu Laporan Kinerja	Mereviu laporan kinerja
	Sekretaris	Mengkoordinasikan teknis reviu laporan kinerja
	Anggota	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal akurat dan berkualitas

KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU,



ASEL GINTING